



DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Daerah
Kota Bekasi**

2025



KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirrohiim

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Disarpusda Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/ komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang

akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bekasi, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BEKASI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IIS WISYNUWATI, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680731 198803 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	7
1.3. Struktur Organisasi	8
1.4. Sumber Daya.....	10
1.5. Aspek Strategis	14
1.6. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	19
1.7. Sistematika Penyajian	22
BAB II Perencanaan Kinerja	24
2.1. Rencana Strategis	24
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	27
2.1.3. Sasaran Program.....	35
2.2. Perjanjian Kinerja	36
BAB III Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	40
3.3. Realisasi Anggaran	68
3.4. Prestasi Organisasi.....	77
BAB IV Penutup	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang wajib diterapkan oleh setiap instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang meliputi anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. LKIP ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai wujud akuntabilitas kepada Wali Kota Bekasi dan pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKIP Disarpusda Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Disarpusda atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKIP digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Disarpusda serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan kinerja Disarpusda di tahun yang akan datang.

Tahun 2025 merupakan tahun perubahan dari periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ke periode RPJMD Tahun 2025-2029, hal ini terjadi karena terpilih dan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah baru pada tahun 2025. Perubahan ini ditindaklanjuti oleh Disarpusda Kota Bekasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Perubahan RPD ke RPJMD berdampak pada perubahan IKU Disarpusda seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1 Perubahan IKU Disarpusda



IKU Disarpusda dirumuskan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. LKIP tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan secara transparan dan akuntabel capaian kinerja organisasi, termasuk analisis atas faktor pendukung dan penghambat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta rekomendasi strategis guna memperbaiki kinerja Disarpusda di tahun berikutnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (Pemerintah Kota Bekasi, DPRD, dan masyarakat) atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029;
2. Menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian dukungan administratif dan teknis kepada DPRD;
3. Memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja melalui analisis menyeluruh terhadap capaian, hambatan, faktor pendukung, serta rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan fakta;
4. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja yang responsif, profesional, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip good governance dan komitmen terhadap Visi Kota Bekasi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”;
5. Menjadi dokumen pendukung dalam proses reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan harapan memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP Disarpusda bermanfaat sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pimpinan dan masyarakat, serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja dalam menilai pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selain itu, LKIP menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran, serta mendorong peningkatan kinerja dan penerapan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

1.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang

Dasar hukum terbentuknya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

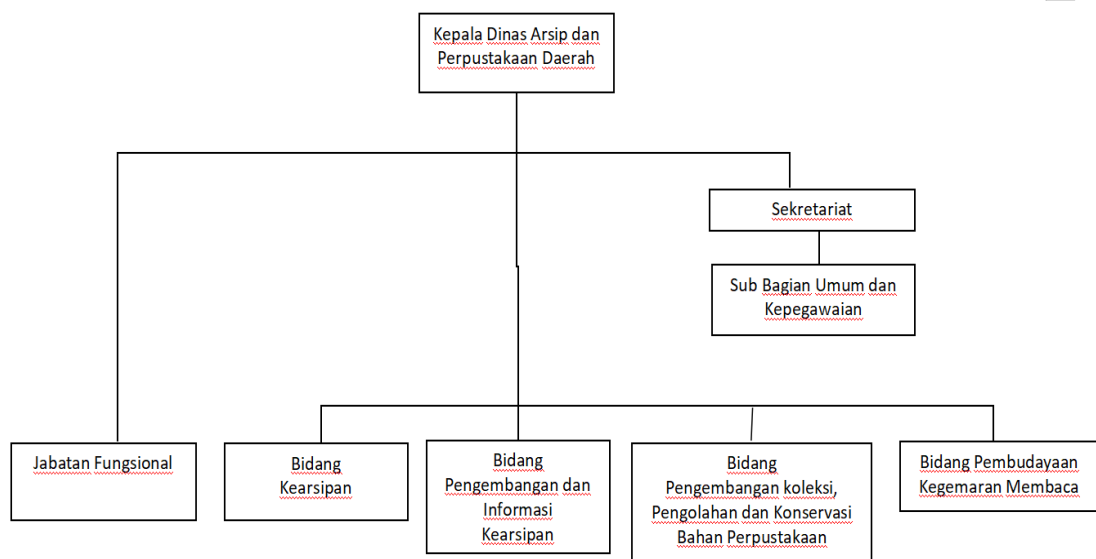
1.3 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi dalam Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan megkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi bidang kearsipan, pengembangan dan informasi kearsipan, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca;
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik;
3. Bidang Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas di bidang kearsipan yang meliputi kearsipan dinamis, kearsipan statis dan preservasi serta pembinaan SDM kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
4. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan kearsipan, data dan informasi kearsipan, pengembangan dan pengawasan kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

5. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan perpustakaan, otomasi dan pengolahan perpustakaan serta pengembangan dan pelestarian koleksi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
6. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca serta kerja sama, promosi dan jejaring perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA**



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021

1.4 Sumber Daya

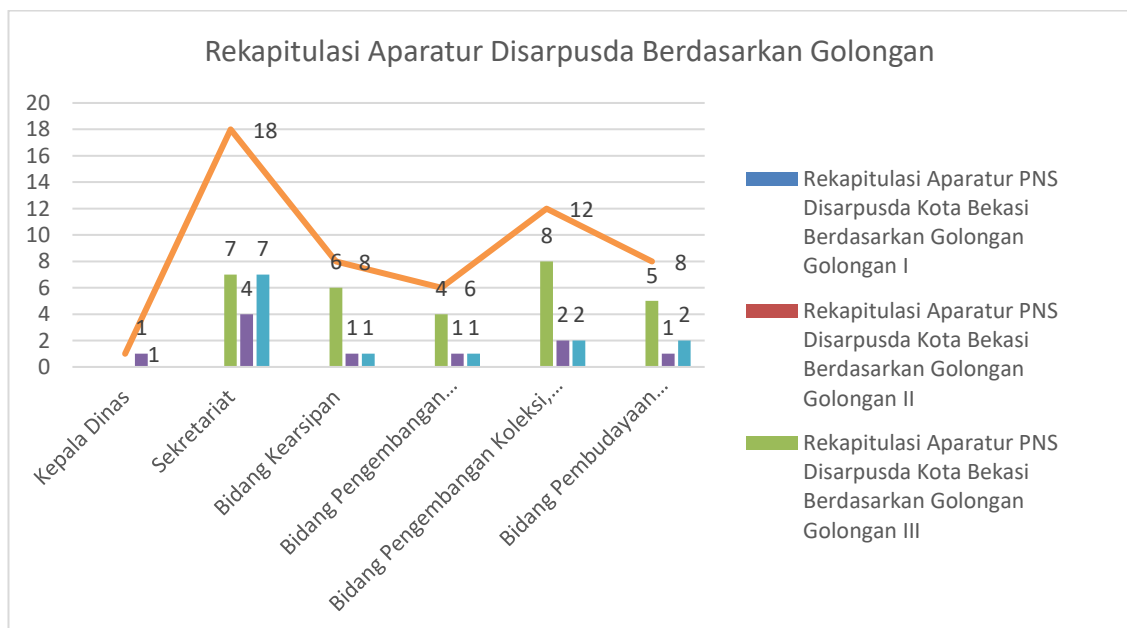
A. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Disarpusda Kota Bekasi dan ketercapaian sasaran kinerja organisasi, Disarpusda memiliki sumber daya aparatur sejumlah yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan PPPK sebanyak 13 orang

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aparatur Disarpusda Kota Bekasi Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				PPPK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	7	4	7	18
3	Bidang Kearsipan	-	-	6	1	1	8
4	Bidang Pengembangan Informasi Kearsipan	-	-	4	1	1	6
5	Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Bahan Pustaka	-	-	8	2	2	12
6	Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca	-	-	5	1	2	8
Jumlah		-	-	30	10	13	53

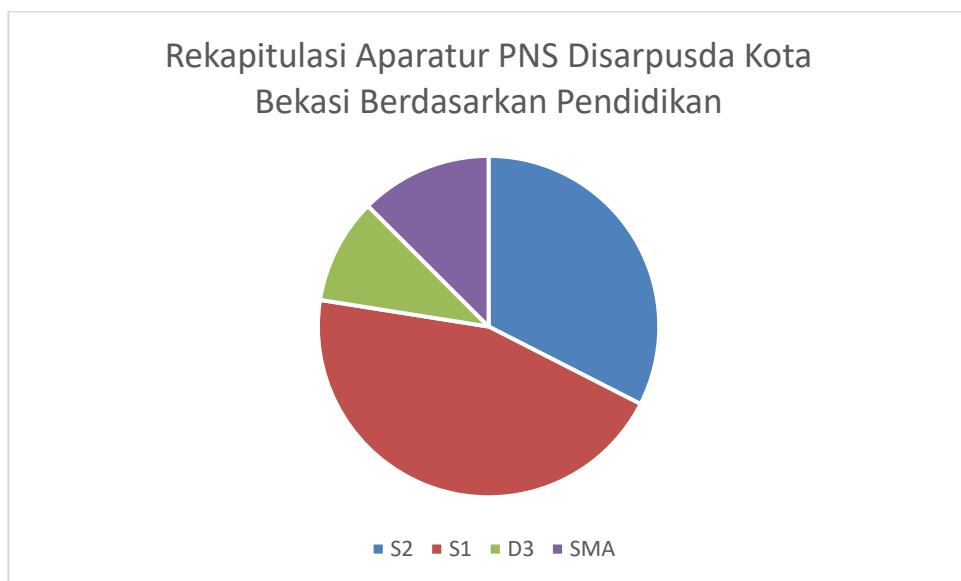
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025



Tabel 1.2
Rekapitulasi Aparatur PNS Disarpusda Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	13
3	S1	18
4	D3	4
5	SMA	5
Jumlah		40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025



Secara kuantitas aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disarpusda. Secara kualitas pun masih kurang memadai, aparatur yang ada masih perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan agar memahami tugas dan fungsinya dalam membantu tugas dinas.

B. Sumber Daya Sarana

Selain sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan, Disarpusda juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disarpusda Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik bidang perpustakaan dan kearsipan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Disarpusda Kota Bekasi

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDAN G	RUSA K	JUMLA H
A	GEDUNG				
1	Depo A	-	1	-	1
2	Depo B	-	1	-	1
3	Gudang A	-	1	-	1
4	Gudang B	-	1	-	1
5	Gedung Layanan Perpustakaan	-	1	-	1
B	KENDARAAN				
1	Sepeda Motor	9	1	-	10
2	Kendaraan Roda Empat	13	1	1	14
3	Kendaraan Mobil Keliling	2	-	-	1
4	Sepeda Motor Keliling	1	-	-	1
C	PERALATAN				
1	Filling Besi/Cabinet	48	-	-	48
2	Lemari Besi	10	-	-	10
3	Lemari Penyimpan	1	-	-	-
4	Roll O Pack Lufo	1	-	-	1
5	Rak Besi/Metal/Arsip	146	-	21	167
6	Rotary filling Roll opack ALBA	2	-	-	2
7	Lemari Kaca	10	-	-	10
8	KOLECER	4			4
9	Lemari Loker 12 Pintu	1	-	-	1
10	Lemari Sorok	4	-	-	4
11	Alat penghancur kertas	12	-	-	12
12	Lemari arsip dinamis	10	-	-	10
13	Papan visual	1	-	-	1
14	Papan Display	1	-	-	1
15	Layar Film	2	-	-	2
16	Angkutan barang trolley krisbow	2	-	-	2
17	Alat Pemadam Portable	13	-	-	13
18	Scanner	8	1	-	9
19	UPS	7	-	-	1
20	Pesawat Telephone Panasonic	1	-	-	1
21	Alat komunikasi lain-lain	1	-	-	1
22	Rak Kayu	86	-	-	86
23	PC Unit	41	-	2	43

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
24	Printer	38	8	-	46
25	Personal Komputer (Lenovo C Series)	1	-	-	1
26	Peralatan Komputer Mainframe (Hardware)	1	-	-	1
27	Camera dan Attachment Canon Ixus 115	1	-	-	1
28	Camera dan Attachment sony	1	-	-	1
29	Camera dan Attachment	3	-	-	3
30	Megaphone TOA	1	-	-	1
31	Microhone Wireles Mic	1	-	-	1
32	Proyektor + Attachment	4	1	1	6
33	Soundsystem portable Xelulont	1	-	-	1
34	Loudspeaker	2	-	-	2
35	Audio Moding Portable	2	-	-	2
36	Gerobak dorong	5	-	-	5
37	Lemari Kayu	7	-	-	7
38	Lemari Kayu Penyimpanan Buku Perpustakaan	41	-	-	41
39	Kursi	47	-	-	47
40	Meja rapat	4	-	-	5
41	Meja Tambahan	1	-	-	1
42	Sofa	8	-	-	8
43	Televisi	6	-	-	6
44	Sound system polytron Home Theatre	1	-	-	1
45	Laptop/Notebok	33	-	1	34
46	Camera dan Attachment Nikon D3200	1	-	-	1
47	Kursi besi rakuda	4	-	-	4
48	Meja panjang	6	-	-	6
49	Meja komputer brilliant (Merk lain)	4	-	-	7
50	Mahframe xeon	1	-	-	1
51	Hardisk external	10	-	-	10
52	Hardisk	2	-	-	2
53	Monitor	7	-	-	7
54	Router TP-Link	1	-	-	1
55	Modem	1	-	-	1
56	Camera elektronik CCTV	2	-	-	2
57	Mesin photo copy fuji xerox DC S 2420	1	-	-	1
58	Lemari buffet kayu	1	-	-	1

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDAN G	RUSA K	JUMLAH
59	Kursi putar	6	-	-	6
60	Kursi Tangan	4	-	-	4
61	Handycam Toshiba	1	-	-	1
62	Display runnting text	1	-	-	1
63	Server	1	-	-	1
64	Rak peralatan	1	-	-	1
65	Switcer Combination	2	-	-	2
66	Peralatn Studio Visual lain-lain	1	-	-	1
67	Loudspeaker	4	-	-	4
68	Microphone	2	-	-	2
69	Stabilisator	1	-	-	1
70	Camera + attachment sony cybershoot	1	-	-	1
71	Power amplifier	1	-	-	1
72	Facsimilie	3	-	-	3
73	Papan Pengumuman	1	-	-	1
74	TV Layanan	1	-	-	1
75	Lemari Besi	1	-	-	1
76	Mesin absensi	3	-	-	3
77	Kipas Angin	2	-	-	2
78	Potable Generating Set	2	-	-	2
79	Stand Komputer	5	-	-	5

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi aset pada tabel diatas sebagian dalam keadaan baik, namun sebagian besar membutuhkan perbaikan serta masih memerlukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja sehingga pelayanan perpustakaan dan kearsipan dapat berjalan dengan baik dan prima seperti perbaikan gedung layanan perpustakaan dan depo arsip, perbaikan mobil perpustakaan keliling, penambahan kebutuhan komputer dan laptop baru.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

1.5.1 Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah menghadapi berbagai aspek strategis organisasi yang memengaruhi

pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap visi, misi, serta sasaran pembangunan Kota Bekasi. Aspek strategis tersebut meliputi kondisi internal dan eksternal organisasi yang harus dikelola secara adaptif dan berkelanjutan.

Pertama, transformasi digital dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan menjadi aspek strategis utama. Tuntutan percepatan layanan, keterbukaan informasi, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengharuskan Disarpusda untuk mengembangkan pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan berbasis digital. Tingkat digitalisasi arsip dan pengembangan perpustakaan digital menjadi indikator penting yang menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik.

Kedua, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan merupakan aspek strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Perbedaan akses layanan dan sumber belajar antarwilayah masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Disarpusda dituntut untuk memastikan layanan perpustakaan dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, penguatan peran perpustakaan dalam pembangunan sumber daya manusia menjadi aspek strategis yang sejalan dengan Misi Kota Bekasi. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan literasi, karakter, dan budaya baca masyarakat. Program literasi yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing SDM yang berbudaya dan humanis.

Keempat, peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan merupakan aspek strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Kearsipan yang tertib, terstandar, dan terdigitalisasi menjadi prasyarat

bagi transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan layanan pemerintahan. Tantangan dalam penataan arsip, keterbatasan SDM kearsipan, serta kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian strategis.

Kelima, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi aspek strategis yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Kompetensi pustakawan, arsiparis, dan tenaga pendukung, serta efektivitas tata kelola organisasi, menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penguatan kapasitas SDM dan budaya kerja berorientasi kinerja menjadi kebutuhan yang berkelanjutan.

Keenam, penguatan kolaborasi dan kemitraan strategis merupakan aspek penting dalam memperluas dampak layanan Disarpusda. Sinergi dengan perangkat daerah lain, satuan pendidikan, komunitas literasi, dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk menciptakan ekosistem literasi dan kearsipan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi faktor pendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, aspek strategis organisasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan, serta dalam mengelola kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel sesuai prinsip SAKIP.

1.5.2 Isu Strategis

Berdasarkan aspek strategis yang telah diuraikan, berikut rumusan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh Disarpusda Kota Bekasi:

1. Belum optimalnya transformasi digital dalam penyelenggaraan kearsipan dan layanan perpustakaan, yang tercermin dari tingkat digitalisasi arsip dan pemanfaatan layanan perpustakaan yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung SPBE dan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.

2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan perpustakaan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang berdampak pada kesenjangan kesempatan belajar dan belum optimalnya peran perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
3. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat penguatan literasi dan pengembangan SDM, khususnya dalam literasi informasi dan literasi digital yang dibutuhkan masyarakat di era transformasi digital.
4. Tantangan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan, meliputi penataan arsip, kompetensi SDM kearsipan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
5. Keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam merespons tuntutan inovasi layanan dan peningkatan kinerja berbasis hasil (outcome).
6. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan layanan perpustakaan dan pembinaan kearsipan secara berkelanjutan.

1.5.3 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

A) Pelayanan Kearsipan

Pelayanan kearsipan yang diselenggarakan oleh Disarpusda Kota Bekasi adalah:

1. Layanan Informasi Kearsipan
2. Layanan Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip
3. Layanan Konsultasi dan Konsultansi Kearsipan
4. Layanan Pembenahan/Penataan Arsip
5. Layanan Pembinaan Kearsipan

B) Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Disarpusda Kota Bekasi adalah:

1. Layanan Perpustakaan Umum yang terdiri dari layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan bimbingan pemustaka, layanan penyediaan bahan pustaka.

2. Layanan Perpustakaan Keliling
3. Layanan Pinjam Pakai Buku
4. Layanan Pembinaan perpustakaan

1.5.4 Sistematika Penyajian

Sistematika LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan dan manfaat, tugas, fungsi dan wewenang, struktur organisasi, sumber daya serta aspek strategis dan isu strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Disarpusda Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Disarpusda Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan strategis dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi landasan dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Melalui perencanaan kinerja, arah dan prioritas pencapaian kinerja ditetapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks LKIP, perencanaan kinerja disusun dengan menjabarkan dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, ke dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, pada subbab berikutnya diuraikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang menjadi dasar perumusan sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

2.1. VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029

Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 menyebutkan Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Gambar 2.1 Visi Kota Bekasi



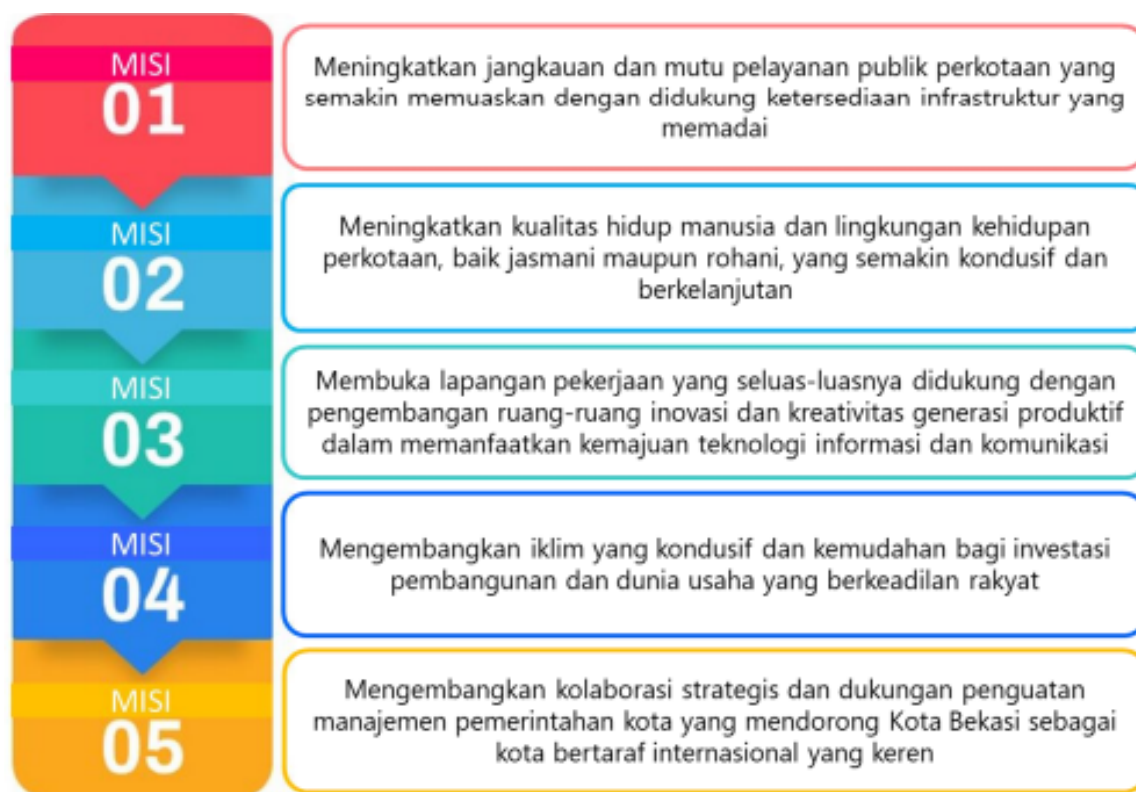
Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat

pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayaannya di Kota Bekasi. Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi, rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

2.2. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, serta pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Melalui Rencana Strategis, perangkat daerah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diampu, dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Renstra juga berfungsi untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026

Perencanaan Tahun 2025 dilakukan pada tahun 2024 dengan mengacu Renstra Tahun 2024-2026 dan RPD Tahun 2024-2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah :

1. “Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi” dengan indikator tujuan “Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja” dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan” dengan indikator sasaran “Indeks Pengawasan Kearsipan”

2. “Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi” dengan indikator tujuan “Nilai Tingkat Kegemaran Membaca” dengan sasaran “Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi” dengan indikator sasaran “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi”
3. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator tujuan “Nilai AKIP” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “Nilai AKIP”

Target tujuan dan sasaran Disarpusda Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Sesuai dengan Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun Ke		
			1	2	3
Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	76	77	78
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	41	42	43
	Meningkatkan pembangunan literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan		Nilai AKIP	80	80.5	81

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun Ke		
			1	2	3
Akuntabilitas Kinerja					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82
		Nilai AKIP	80	80.5	81

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2 IKU Urusan Kearsipan

Sasaran		Indikator	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan indikator ini berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Dimana formulasi penghitungan nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal sesuai dengan Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Sumber data nilai ini diperoleh dari Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan dan Bidang Kearsipan Disarpusda.

Untuk penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 IKU Urusan Perpustakaan

Sasaran		Indikator Sasaran	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan indikator ini berdasarkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan indikator tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan. Rumus penghitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembagiya yaitu komponen aspek masyarakat. Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks, yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1): Mengukur sejauh mana layanan perpustakaan tersedia dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2): Menilai kecukupan dan keberagaman koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat.
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3): Mengevaluasi jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pengunjung.
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4): Mengukur frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai indikator partisipasi dan minat baca.

5. Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (UPLM5): Menilai jumlah perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi (UPLM6): Mengukur partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan minat terhadap literasi.
7. Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM7): Menilai jumlah individu yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan, mencerminkan tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat terhadap penggunaan layanan perpustakaan.

Untuk penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 IKU Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82
		Nilai AKIP	80	80.5	81

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM ini dihitung berdasarkan hasil nilai persepsi pengguna Per unsur yang terdiri dari (1)

persyaratan, (2) sistem, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan (9) sarana prasarana. Hasil indeks Kepuasan Masyarakat dinyatakan dalam suatu nilai.

Sedangkan penentuan indikator Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Nilai AKIP ini dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja dengan bobot 30%, (2) pengukuran kinerja dengan bobot 30% (3) pelaporan kinerja dengan bobot 15% dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Hasil evaluasi AKIP dinyatakan dalam suatu predikat dan nilai. Kedua data indikator ini diperoleh dari sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi yang melakukan survey di layanan kearsipan dan layanan perpustakaan.

2.2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Disarpusda menyusun Renstra yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah

Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah serta melakukan sinkronisasi dengan Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan dan sasaran Disarpusda merupakan arah dan pandangan ke depan dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi yang terangkum dalam RPJMD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dalam mengantisipasi tantangan masa depan dan memuat cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berkarya secara kreatif, inovatif, produktif dan konsisten pada pertumbuhan (*sustainable growth*).

Adapun tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya budaya membaca Masyarakat dan mutu kearsipan” dengan indikator tujuan “Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pengawasan Kearsipan”. Sedangkan sasarannya yaitu “Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan” dengan indikator sasaran “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip”. Target tujuan dan sasaran Disarpusda Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Sesuai dengan Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Tujuan RPJMD: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	Tujuan Renstra: Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan	Indikator Tujuan I: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca			76,92	77.02	77.12	77.22	77.32	77.42	77.52	
Sasaran RPJMD : Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata			Sasaran Renstra I: Meningkatnya pembangunan literasi Masyarakat	Indikator Sasaran I: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59,36	59.46	59.56	59.66	59.76	59.86	59.96	
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan		Indikator Tujuan II: Indeks pengawasan kearsipan			85,16	85.26	85.36	85.46	85.56	85.66	85.76	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
modern dan inovatif												
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas layanan publik yang prima			Sasaran Renstra II Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan	Indikator Sasaran II: Indeks tingkat digitalisasi arsip	93	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029. Penyesuaian tersebut berdampak pada arah kebijakan, sasaran strategis, serta fokus pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelarasan indikator kinerja perangkat daerah agar tetap relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Sejalan dengan penetapan Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian IKU untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara visi dan misi Kepala Daerah, sasaran strategis perangkat daerah, serta indikator kinerja yang diukur. Perubahan IKU ini bertujuan untuk memperkuat orientasi kinerja pada hasil (outcome) dan dampak (impact) yang lebih selaras dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kearsipan dan literasi masyarakat.

Dengan demikian, perubahan IKU tidak dimaknai sebagai perubahan arah kebijakan kinerja secara mendasar, melainkan sebagai upaya penyelarasan perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai

dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator kinerja utama Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditunjukkan dalam table sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Tabel IKU dan Formulasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	1 Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	Tingkat digitalisasi arsip merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan tata kelola kearsipan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Elektronik (PADE) menyebutkan digitalisasi arsip dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.	Menggunakan instrumen Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menilai aspek digitalisasi, implementasi aplikasi, serta sumber daya pendukungnya.	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Dan Informasi Kearsipan 2 Bidang Kearsipan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator kinerja kunci outcome urusan perpustakaan dimana mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dimensi Instrumen IPLM terdiri dari: 1. Dimensi Kepatuhan/Compliance Jumlah koleksi tercetak Jumlah koleksi elektronik Jumlah Penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir Jumlah Penambahan koleksi elektronik dalam satu tahun terakhir Jumlah pustakawan sesuai kualifikasi pendidikan Jumlah tenaga teknis perpustakaan Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB 2. Dimensi Kinerja/Performance (satu tahun terakhir) Jumlah Koleksi tercetak yang dimanfaatkan Jumlah Koleksi elektroik yang dimanfaatkan Jumlah Masyarakat	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Preservasi Bahan Perpustakaan 2 Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK Jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan literasi Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan Jumlah variasi dan layanan yang tersedia Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan		

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, Penentuan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan indikator tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan. IPLM merupakan pengukuran yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia untuk menilai sejauh mana upaya pengembangan perpustakaan dalam membangun budaya literasi masyarakat sebagai wahana belajar seumur hidup.

Terdapat perubahan formulasi perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada akhir tahun 2025 menjadi dua dimensi utama yaitu dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Dalam dimensi kepatuhan mencakup sub-komponen koleksi dan tenaga perpustakaan yang menggambarkan sejauh mana perpustakaan memenuhi standar dasar layanan. Sedangkan dalam dimensi kinerja yang mencakup pelayanan perpustakaan dan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan, menunjukkan efektivitas dan dampak layanan perpustakaan terhadap layanan. Sumber data nilai ini diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI.

Adapun penentuan Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan yaitu Nilai Tingkat digitalisasi arsip merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan tata kelola kearsipan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 mengatur pengawasan kearsipan di instansi pemerintah termasuk penilaian atas aspek pengelolaan arsip, baik eksternal maupun internal. Digitalisasi arsip menjadi bagian dari penilaian dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.

Dalam kerangka Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), nilai tingkat digitalisasi arsip memiliki posisi yang strategis karena menjadi indikator konkret dari tata kelola pemerintahan berbasis digital, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan arsip yang telah terdigitalisasi dan dikelola melalui ABKD (SRIKANDI dan JIKN) menunjukkan bahwa proses bisnis pemerintahan telah berjalan secara terdokumentasi, tertelusur (traceable), dan dapat diaudit. Kondisi ini sangat relevan dengan area perubahan RB, khususnya pada penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan, karena arsip digital menjadi bukti utama atas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Secara teknis, nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI, yang di dalamnya terdapat nilai tingkat digitalisasi arsip, digunakan sebagai data dukung dan indikator dalam penilaian RB General oleh Kementerian PANRB. Semakin tinggi nilai digitalisasi arsip, semakin tinggi pula tingkat kematangan tata kelola informasi pemerintahan suatu instansi. Implementasi SRIKANDI yang optimal menunjukkan bahwa surat, naskah dinas, dan arsip dinamis telah dikelola secara elektronik dan terintegrasi, sementara keaktifan dalam JIKN menunjukkan keterbukaan informasi dan kontribusi terhadap sistem kearsipan nasional. Jika nilai digitalisasi rendah, hal ini mencerminkan lemahnya disiplin administrasi, belum tertatanya proses bisnis digital, dan terbatasnya ketersediaan bukti kinerja, yang secara langsung menurunkan skor pada area RB terkait tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas layanan.

Dengan demikian, nilai digitalisasi arsip bukan sekadar indikator teknis kearsipan, melainkan merupakan proxy atas tingkat kematangan birokrasi digital. Bagi pemerintah daerah seperti Disarpusda, peningkatan nilai ini akan memperkuat capaian RB karena memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi

tercatat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik, sehingga mendukung transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Sumber data nilai ini diperoleh dari ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Program Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran program untuk pencapaian tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi periode 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Program pertama yaitu “Program Pembinaan Perpustakaan” dengan sasaran program (SP1) yang ingin dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan indikator kinerja program yaitu persentase penambahan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan yang dilihat dari jumlah perpustakaan yang sudah memiliki nomor pokok perpustakaan (NPP) dengan target penambahan sebesar 10% dari tahun 2024 sebanyak 100 perpustakaan, target 2025 sebanyak 110 perpustakaan.
- b. Program Kedua yaitu “Program Pengelolaan Arsip” dengan sasaran program (SP2) yang ingin dicapai Disarpusda adalah Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dengan target Tahun 2025 sebesar 56,81% atau 25 Perangkat Daerah.
- c. Program Ketiga yaitu Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran program (SP3) yang ingin dicapai Disarpusda adalah Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan NSPK dengan indikator

kinerja persentase penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip dengan target Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar 10% dari tahun 2024 sebanyak 403 Boks atau sebanyak 443 boks

- d. Program Keempat yaitu “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” dengan sasaran program (SP4) yang ingin dicapai Disarpusda ada 4 (empat) sasaran yaitu (1) Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran dilihat dari indikator kinerja persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran dimana target Tahun 2025 sebesar 100%, (2) Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan dengan indikator kinerja persentase capaian kinerja keuangan penunjang urusan Dimana target tahun 2025 sebesar 87,46%, (3) Meningkatnya nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) perangkat daerah dengan indikator kinerja indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) perangkat daerah dan target tahun 2025 sebesar 81.45, (4) Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dengan indikator kinerja persentase pengeolaan barang milik daerah yang akuntabel dengan target tahun 2025 sebesar 80%.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 pada awal tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran tahunan dari Renstra tersebut dan menjadi komitmen kinerja yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja pada awal periode berjalan. Adapun perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81
		Nilai AKIP	Nilai	80.5
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai	63
3.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	54

Sehubungan dengan ditetapkan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan. Perjanjian Kinerja Perubahan ini disusun untuk menyelaraskan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam Renstra yang baru, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, dan pelaporan kinerja tetap terjaga. Perjanjian kinerja perubahan antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59.46
2.	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	93.01

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Disarpusda Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Disarpusda Kota Bekasi didukung anggaran tahun 2025 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Disarpusda Kota Bekasi
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.052.116.160	APBD
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	480.758.000	APBD
1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	39.512.000	APBD
1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.496.000	APBD
1.3	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	250.000.000	APBD
1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	35.250.000	APBD
1.5	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	59.500.000	APBD
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	571.358.160	APBD
2.1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	106.724.000	APBD
2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.026.160	APBD
2.3	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	276.608.000	APBD
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.812.580.910	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.745.000	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.745.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.210.930.000	APBD
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.195.930.000	APBD
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	APBD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.500.000	APBD
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.500.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.377.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	APBD
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	APBD
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.837.000	APBD
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.560.000	APBD
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	APBD
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	APBD
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.130.000	APBD
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.850.000	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.276.000	APBD
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.276.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.637.910	APBD
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	APBD
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.637.910	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.115.000	APBD
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000	APBD
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.140.000	APBD
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	APBD
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.975.000	APBD
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	645.826.000	APBD
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	427.779.000	APBD
1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	119.151.000	APBD
1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.948.000	APBD
1.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	33.680.000	APBD
2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	197.820.000	APBD
2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	197.820.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20.227.000	APBD
3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20.227.000	APBD
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	147.013.750	APBD
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	117.013.750	APBD
1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	117.013.750	APBD
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30.000.000	APBD
2.1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	30.000.000	APBD
3	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	197.820.000	APBD
3.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	197.820.000	APBD
TOTAL PAGU		Rp.15.657.536.820	

Sumber : Data diolah dari DPA Perubahan Disarpusda Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan kinerja didasarkan pada pengukuran dan penilaian dari rencana kinerja dan target yang ingin dicapai. Pengukuran juga dilakukan untuk melihat secara langsung dampak yang telah ditimbulkan oleh kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan capaian kinerja (performance result) berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran dan penilaian ini disusun dalam bentuk persentase yang digambarkan secara kuantitatif terhadap capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2025.

3.1.1 Capaian IKU Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD 2024

Pengukuran kinerja berdasarkan Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD 2024 dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, sesuai dengan Renja Tahun 2025. Berikut capaian kinerja Disarpusda sampai dengan triwulan III yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Adapun capaian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Disarpusda
Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	86.63	106,95
		Nilai AKIP	80.5	71.98	89,42

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	63	Nilai baru keluar di TW IV	0
3.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	54	Nilai baru keluar di TW IV	0

Realisasi indikator kinerja sasaran strategi/indikator kinerja sampai dengan Triwulan III dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk pencapaian Indeks pengawasan kearsipan dan Indeks Pembangunan literasi Masyarakat sampai dengan triwulan III belum keluar nilainya karena Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI baru melakukan penghitungannya di triwulan IV setiap tahunnya.
2. Indeks Kepuasan masyarakat, realisasi sebesar 86.63 indikator ini telah melampaui targetnya yaitu 81, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 106.95%
3. Nilai AKIP, realisasi sebesar 71,98. Indikator ini belum mencapai targetnya yaitu 80,5 atau A, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 89,41%

Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama Disarpusda Kota Bekasi tersebut akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Strategis Disarpusda Triwulan III Tahun 2025



3.1.2 Capaian IKU Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD 2025-2029

Pengukuran IKU Disarpusda berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja yang didalamnya terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun capaian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN / SASARAN TAHUN 2025			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Tujuan : Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	77.02	54,62	70.92%	Tidak Tercapai
	Indeks Pengawasan Kearsipan	85.26	85.65	100,4%	Tercapai
Sasaran: Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59.46	9.41	15.82%	Tidak Tercapai
Sasaran: Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	93.1	92	98.81%	Tidak Tercapai

Sumber: Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan data hasil evaluasi

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Disarpusda Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi;
2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan.

Pengukuran kinerja Disarpusda Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama. Realisasi indikator kinerja sasaran strategi/indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 9.41 indikator ini belum mencapai targetnya yaitu 59.46, capaian indikator ini sebesar 15.82%

2. Realisasi Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip tahun 2025 sebesar 92 atau nilai A. indicator ini belum mencapai targetnya yaitu 93.1, capaian indicator ini sebesar 98.81%.

Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama Disarpusda Kota Bekasi tersebut akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Disarpusda Tahun 2025



3.2 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa

yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

3.2.1 Capaian IKU Renstra Tahun 2024-2026

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Triwulan III tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 4 indikator sasaran dari 3 sasaran serta analisis pencapaian kinerja secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan

Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator indeks pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan terdiri atas :

- a. Pengawasan Kearsipan Eksternal terdiri atas: pengawasan sistem kearsipan eksternal dan pengawasan penyelamatan arsip statis eksternal (dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan sistem kearsipan eksternal)
- b. Pengawasan Kearsipan Internal terdiri atas pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Triwulan III Tahun 2025

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Indeks
Pengawasan Kearsipan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai	63	Nilai belum tersedia	0	

Sumber data Bidang PIK Disarpusda

Target Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 63 atau kategori B sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, namun sampai dengan Triwulan III

Tahun 2025 realisasi indikator tersebut belum dapat ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Indeks Pengawasan Kearsipan merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan dan diperoleh melalui hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat serta Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI), sehingga nilai realisasi baru dapat diketahui setelah seluruh proses pengawasan selesai pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tetap melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan penguatan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah sebagai langkah untuk mendukung pencapaian target Indeks Pengawasan Kearsipan sesuai yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

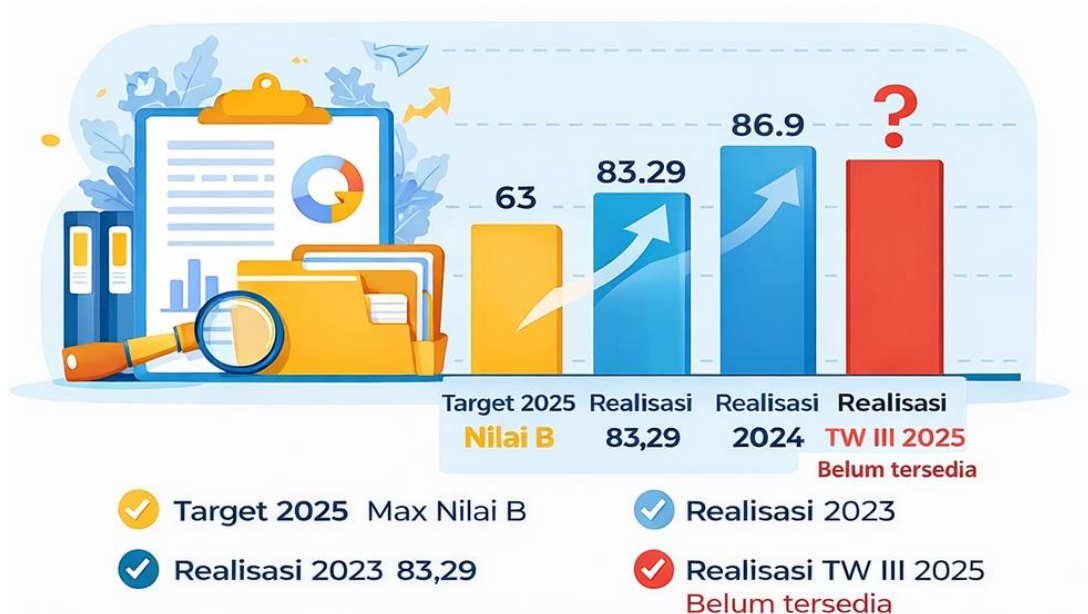
Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2025 dengan realisasi beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi TW III 2025	Ket
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	63	83.29	86.9	Nilai belum tersedia	

Penetapan target Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sebesar 63 dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi perubahan metode dan instrumen perhitungan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal. Meskipun capaian Indeks Pengawasan Kearsipan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang tinggi,

penetapan target tidak hanya didasarkan pada capaian historis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kebijakan dan penyempurnaan metodologi penilaian agar target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan objektif, tanpa mengurangi komitmen Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara berkelanjutan.

G



c. Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indeks Pengawasan Kearsipan dengan
Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024-2026		Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja (%)	
			2024	2025	2024	2025	2024	TW III 2025
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai	62	63	86.9	Nilai Belum Tersedia	140.16%	Nilai Belum Tersedia

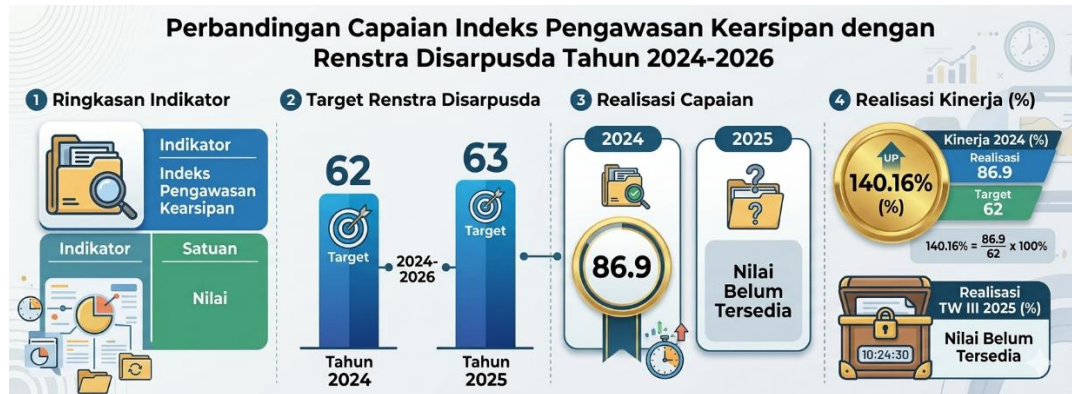
Sumber: Bidang PIK Disarpusda, Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026 menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki karakteristik pengukuran tahunan. Target Indeks Pengawasan Kearsipan dalam Renstra ditetapkan sebesar 62 pada Tahun 2024 dan meningkat menjadi 63 pada Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2024, realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Kota Bekasi mencapai nilai 86,9 atau sebesar 140,16 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target Renstra Tahun 2024. Sementara itu, realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III belum dapat diketahui, karena nilai indikator ini diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dan internal, sehingga penilaiannya baru dapat ditetapkan pada akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, evaluasi capaian Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 terhadap target Renstra akan dilakukan setelah seluruh proses pengawasan kearsipan selesai dan nilai resmi ditetapkan. Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tetap melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Indeks pengawasan kearsipan serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks Pengawasan Kearsipan merupakan indikator kinerja yang pengukurannya dilakukan secara tahunan melalui proses pengawasan kearsipan internal dan eksternal. Oleh karena itu, realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III belum dapat ditetapkan karena masih menunggu hasil penilaian resmi pada akhir tahun anggaran oleh Arsip Nasional RI dan Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan telah dilaksanakan sebagai langkah antisipatif untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang menunjukkan hasil sangat baik, peningkatan kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan pembinaan kearsipan secara berkelanjutan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi kepada perangkat daerah yang memiliki nilai pengawasan kearsipan di bawah standar. Pembinaan

difokuskan pada penguatan pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah dan unit kearsipan perangkat daerah, yang mencakup aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip, serta didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan.

Selain itu, meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam mengelola arsip sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) turut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pengelolaan kearsipan. Dukungan dan perhatian pimpinan perangkat daerah, antara lain melalui pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA), juga menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja kearsipan secara berkelanjutan.

Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Pengawasan Kearsipan pada Tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi terus mendorong pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh perangkat daerah dan mendukung pencapaian target Indeks Pengawasan Kearsipan setelah nilai resmi Tahun 2025 ditetapkan.



e. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pengawasan Kearsipan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Indeks Pengawasan Kearsipan merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan, sehingga realisasi nilai Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III belum dapat ditetapkan karena masih menunggu hasil penilaian resmi pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, berbagai program telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Program yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Program Pengelolaan Arsip dilaksanakan dengan indikator program persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara tertib. Program ini berfokus pada penguatan tata kelola arsip dinamis pada perangkat daerah

melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan pemahaman terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kearsipan. Melalui program ini, perangkat daerah didorong untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara sistematis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara tertib berdampak langsung pada perbaikan kualitas pengelolaan arsip, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai Indeks Pengawasan Kearsipan.

Selain itu, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan indikator program jumlah penambahan khasanah arsip statis turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian kinerja kearsipan. Program ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan, hukum, dan pertanggungjawaban nasional. Penambahan khasanah arsip statis mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perangkat daerah dalam menyerahkan arsip statis sesuai ketentuan, sekaligus menunjukkan efektivitas pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Secara keseluruhan, sinergi antara Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memperkuat sistem pengelolaan kearsipan dari hulu hingga hilir. Program-program tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target indikator program, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola kearsipan, yang tercermin dalam capaian Indeks Pengawasan Kearsipan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi

Sasaran ini dapat terlihat ketercapaiannya melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat.

Rumus penghitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembagiannya yaitu komponen aspek masyarakat. Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks, yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1): Mengukur sejauh mana layanan perpustakaan tersedia dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2): Menilai kecukupan dan keberagaman koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat.
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3): Mengevaluasi jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pengunjung.
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4): Mengukur frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai indikator partisipasi dan minat baca.

5. Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (UPLM5): Menilai jumlah perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi (UPLM6): Mengukur partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan minat terhadap literasi.
7. Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM7): Menilai jumlah individu yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan, mencerminkan tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat terhadap penggunaan layanan perpustakaan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

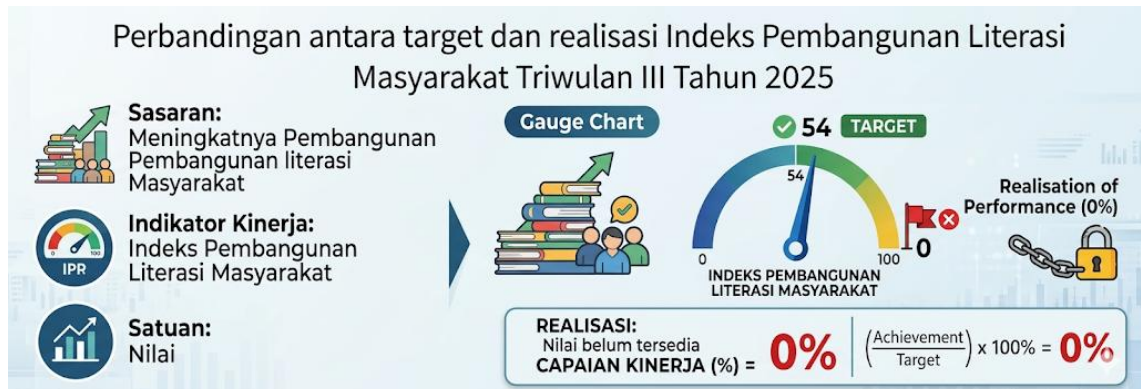
Tabel 3.6

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya Pembangunan literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	54	Nilai belum tersedia	0	

Target IPLM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 54 atau kategori Sedang sesuai dengan Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024-2026, namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 realisasi indikator tersebut belum dapat ditetapkan. Hal ini disebabkan karena IPLM merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI, sehingga nilai realisasi baru dapat diketahui setelah seluruh

proses pengumpulan pengolahan data selesai pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, Disarpusda Kota Bekasi tetap melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan penguatan pengelolaan perpustakaan pada perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus yang ada di Kota Bekasi sebagai langkah untuk mendukung pencapaian target IPLM sesuai yang telah ditetapkan.



b. Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan target tahun 2025 dengan realisasi capaian indicator di tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi TW III 2025	Ket
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	54	51,79	59,36	Nilai belum tersedia	

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan adanya tren peningkatan capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi IPLM Kota Bekasi pada Tahun 2024 mencapai nilai 59,36, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2023

sebesar 51,79. Sementara itu, target IPLM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 54 sebagaimana tercantum dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Penetapan target tersebut mempertimbangkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta prinsip kehati-hatian agar target yang ditetapkan tetap realistis dan terukur. Dengan capaian IPLM Tahun 2024 yang telah melampaui target Tahun 2025, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan literasi masyarakat yang telah dilaksanakan memberikan hasil positif dan menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian target kinerja IPLM Tahun 2025 secara berkelanjutan.



c. Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

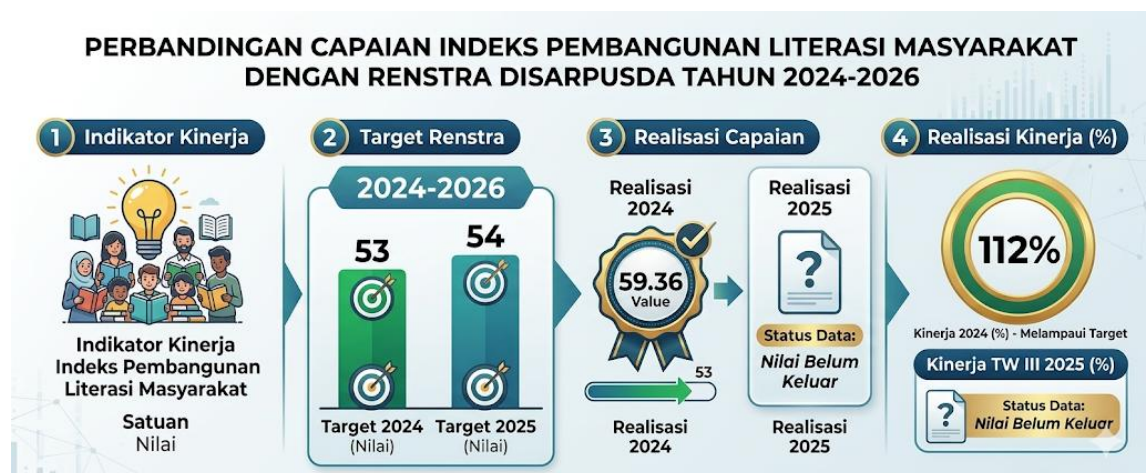
Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024-2026		Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja (%)	
			2024	2025	2024	2025	2024	TW III 2025
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	53	54	59.36	Nilai Belum Keluar	112%	Nilai Belum Keluar

Sumber: Bidang PKM Disarpusda, Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026 menunjukkan capaian kinerja yang positif. Pada Tahun 2024, target IPLM ditetapkan sebesar 53 dan realisasi yang dicapai sebesar 59,36, sehingga kinerja IPLM melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk Tahun 2025 target IPLM dalam Renstra ditetapkan sebesar 54, namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 realisasi IPLM belum dapat diketahui karena hasil pengukuran indikator tersebut baru ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI pada akhir tahun. Meskipun demikian, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tetap melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengembangan literasi masyarakat sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target IPLM Tahun 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi pada Tahun 2024 yang melampaui target Renstra menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan literasi masyarakat. Capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dalam mengimplementasikan berbagai program literasi yang terarah dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan daerah, komitmen pimpinan, serta sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan budaya literasi masyarakat.

Selain itu, peningkatan IPLM juga dipengaruhi oleh optimalisasi penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kegiatan literasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan program peningkatan minat baca, penguatan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan secara lebih efektif menjadi faktor pendukung dalam peningkatan capaian IPLM. Upaya tersebut mendorong meningkatnya akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan aktivitas literasi, yang secara bertahap berdampak positif terhadap indeks literasi.

Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian IPLM pada Tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi telah dan terus melakukan penguatan program literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan, perluasan jangkauan kegiatan

literasi, serta penguatan kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, dan pihak terkait lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat mengantisipasi potensi fluktuasi capaian IPLM serta memastikan keberlanjutan peningkatan budaya literasi masyarakat sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.



e. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Program ini menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan, khususnya melalui kegiatan pengelolaan perpustakaan yang difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan, serta penyediaan dan pemutakhiran koleksi bahan bacaan. Melalui pengelolaan perpustakaan yang lebih baik, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi berkembang sebagai

pusat pembelajaran, informasi, dan aktivitas literasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, keberhasilan peningkatan IPLM juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang menjadi bagian integral dari Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk sosialisasi, kampanye literasi, dan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan membaca dan literasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kegiatan, tetapi juga pada kualitas dan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan minat baca secara berkelanjutan. Sinergi dengan satuan pendidikan, komunitas literasi, dan pemangku kepentingan lainnya turut memperluas jangkauan serta dampak dari kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Secara keseluruhan, integrasi antara kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca dalam Program Pembinaan Perpustakaan telah menciptakan ekosistem literasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya menghasilkan keluaran berupa terselenggaranya kegiatan dan layanan perpustakaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses, partisipasi, dan kualitas literasi masyarakat. Dengan demikian, Program Pembinaan Perpustakaan berperan strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja IPLM serta menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan budaya literasi masyarakat Kota Bekasi secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Ketercapaian sasaran ini terlihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disarpusda. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyebutkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur dan mengevaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terdapat 9 (sembilan) unsur yang menjadi indikatornya yaitu : persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen yang dinilai dalam SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2025

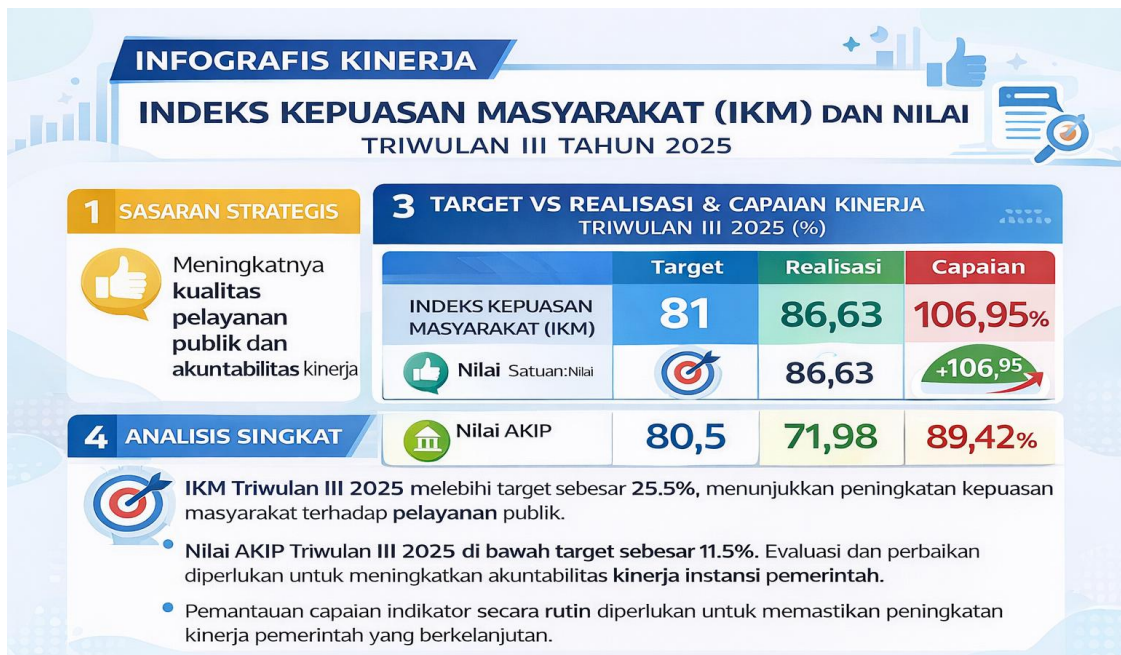
Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan
Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja TW III 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	86,63	106,95	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	80.5	71.98	89,42	

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target IKM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 81, sementara realisasi yang dicapai sebesar 86,63, sehingga kinerja IKM telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta tingkat kepuasan masyarakat yang semakin baik terhadap layanan yang diterima.

Sementara itu, untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,5. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 realisasi Nilai AKIP tercatat sebesar 71,98 dengan tingkat capaian sebesar 89,42 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun secara proporsional kinerja akuntabilitas instansi telah berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan kinerja. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah terus melakukan penguatan implementasi SAKIP sebagai upaya untuk meningkatkan capaian Nilai AKIP hingga akhir tahun anggaran.



b. Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan target tahun 2025 dengan realisasi capaian indikator di tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Perbandingan antara target dengan realisasi IKM dan Nilai AKIP Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi TW III 2025	Ket
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81.17	93.19		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80.5	55.01	69.89	71.98	

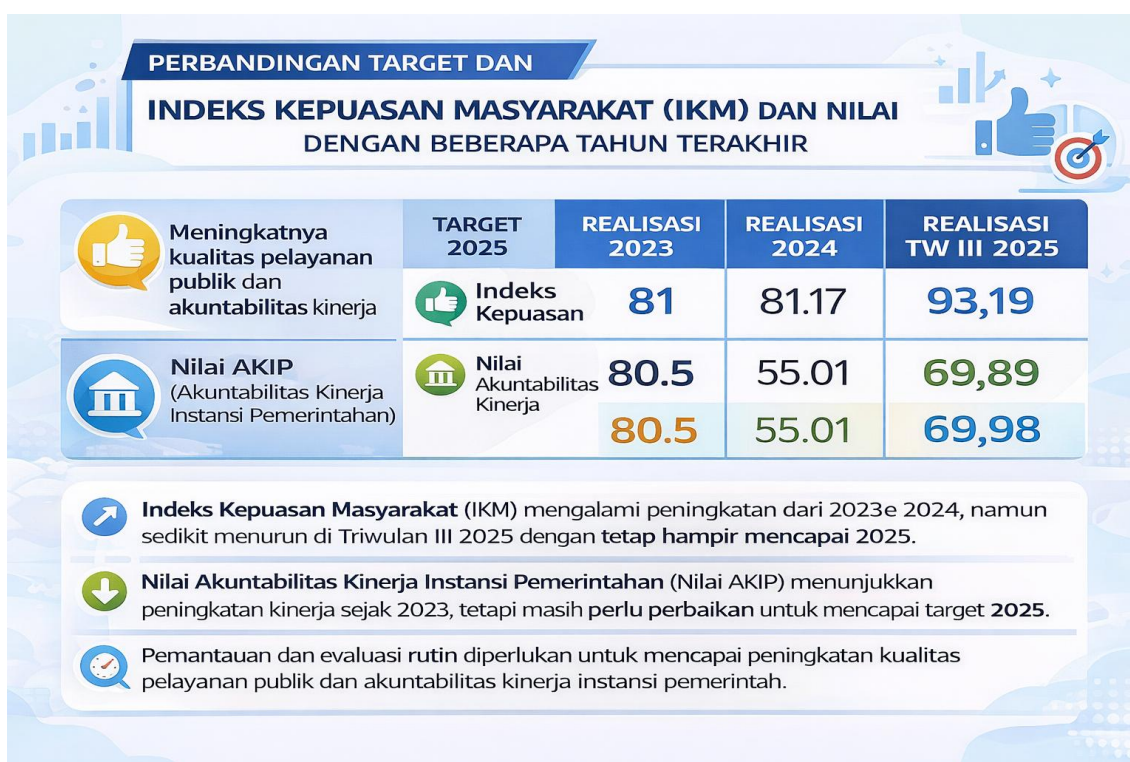
Perbandingan antara target Tahun 2025 dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren capaian kinerja yang sangat positif. Target IKM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 81, sementara realisasi IKM pada Tahun 2023 tercatat sebesar 81,17 dan meningkat signifikan pada Tahun 2024 menjadi 93,19. Sampai

dengan Tahun 2025, realisasi IKM mencapai 93,2, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah secara konsisten berada di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

Capaian IKM yang secara konsisten melampaui target menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah berkomitmen untuk mempertahankan capaian IKM melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan kompetensi SDM pelayanan, serta pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, perbandingan antara target dan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja meskipun belum sepenuhnya mencapai target Tahun 2025. Target Nilai AKIP Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,5, yang mengacu pada capaian Nilai AKIP Tahun 2022 sebesar 79,88 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024–2026. Realisasi Nilai AKIP pada Tahun 2023 sebesar 55,01 kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 69,89, dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 71,98. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan implementasi SAKIP secara bertahap, yang terus diupayakan untuk mendekati target yang telah ditetapkan hingga akhir periode penilaian.

Adapun terhadap Nilai AKIP, meskipun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan arah perbaikan yang positif. Selisih antara target dan realisasi menjadi dasar bagi instansi untuk terus melakukan penguatan implementasi SAKIP, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi secara bertahap sehingga target Nilai AKIP dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra.



c. Perbandingan Realisasi IKM dan Nilai AKIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKM dan Nilai AKIP dengan
Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

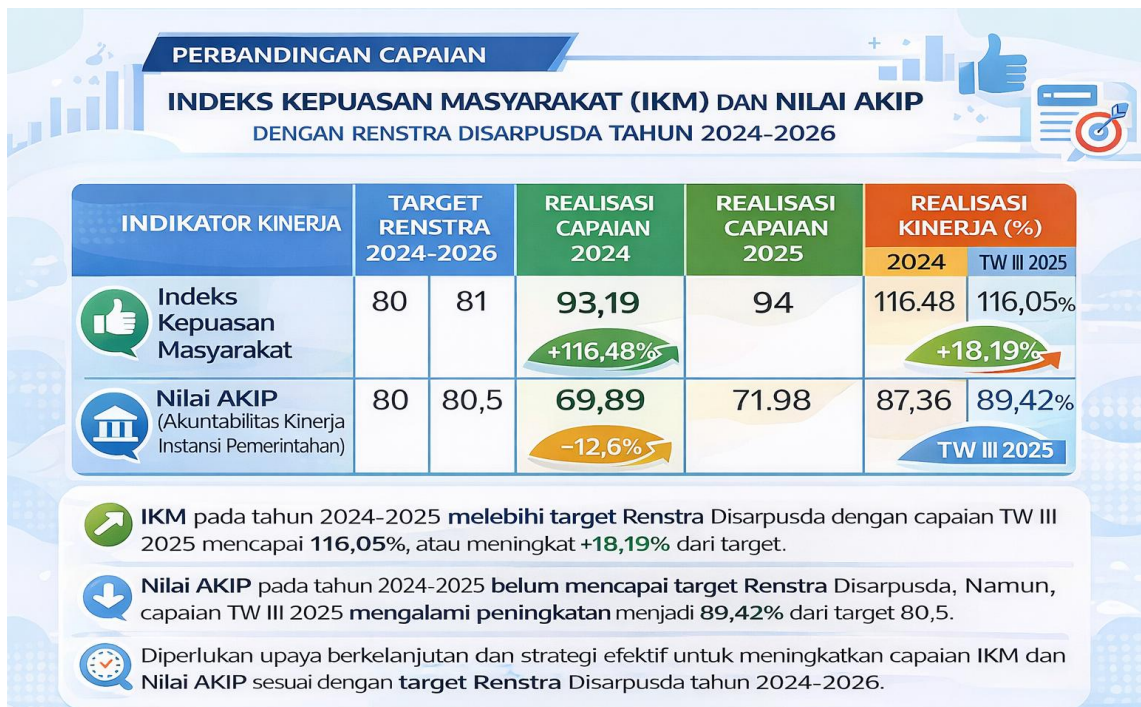
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024-2026		Realisasi Capaian		Realisasi Kinerja (%)	
			2024	2025	2024	2025	2024	TW III 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	81	93.19	94	116.48	116.05
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	80	80,5	69.89	71.98	87,36	89,42

Sumber: Sekretariat Disarpusda, Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024–2026 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2024, target IKM ditetapkan sebesar 80 dengan realisasi sebesar 93,19 atau capaian sebesar 116,48 persen. Selanjutnya pada Tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 81 dan realisasi yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 94 dengan tingkat capaian sebesar 116,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan secara konsisten telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra.

Sementara itu, perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra menunjukkan adanya peningkatan kinerja akuntabilitas secara bertahap. Pada Tahun 2024, target Nilai AKIP ditetapkan sebesar 80 dengan realisasi sebesar 69,89 atau capaian sebesar 87,36 persen. Pada Tahun 2025, target Nilai AKIP meningkat menjadi 80,5

dan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 71,98 dengan tingkat capaian sebesar 89,42 persen. Meskipun realisasi Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target Renstra, tren peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP yang terus diupayakan hingga akhir periode penilaian.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan IKM dan Nilai AKIP serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang secara konsisten melampaui target Renstra menunjukkan keberhasilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Faktor utama yang mendorong keberhasilan tersebut antara lain perbaikan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta optimalisasi sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan. Selain itu, pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan turut berkontribusi

dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan, sehingga capaian IKM terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Sementara itu, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya ruang perbaikan dalam implementasi SAKIP, khususnya pada aspek keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan manajerial. Kesenjangan antara target dan realisasi juga menunjukkan bahwa penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas masih perlu dilakukan secara lebih konsisten di seluruh unit kerja.

Sebagai alternatif solusi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mempertahankan capaian IKM sekaligus meningkatkan Nilai AKIP. Upaya tersebut meliputi penguatan standar operasional prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan SAKIP, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar lebih berorientasi pada hasil. Selain itu, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terus dilakukan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan langkah perbaikan, sehingga diharapkan capaian Nilai AKIP dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada akhir periode penilaian.



e. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tidak terlepas dari peran strategis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Program ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penyediaan dukungan administratif, manajerial, dan teknis yang terintegrasi. Ketersediaan sistem administrasi yang tertib, dukungan kepegawaian yang memadai, serta pengelolaan keuangan dan sarana prasarana yang efektif menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan kualitas pelayanan publik dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian IKM, Program Penunjang berperan dalam menciptakan lingkungan kerja dan sistem pelayanan yang kondusif bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan,

pengelolaan pengaduan masyarakat, serta fasilitasi survei kepuasan masyarakat memungkinkan unit layanan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur melalui pembinaan administrasi dan pelayanan turut berkontribusi terhadap meningkatnya profesionalisme aparatur, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan dan perpustakaan.

Sementara itu, dalam mendukung peningkatan Nilai AKIP, Program Penunjang berperan penting dalam penguatan implementasi SAKIP di lingkungan Disarpusda. Sekretariat memfasilitasi proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja yang lebih terstruktur dan akuntabel, termasuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu dan berkualitas. Melalui dukungan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala, Program Penunjang membantu memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi secara berkelanjutan.

3.2.2 Capaian IKU Renstra Tahun 2025-2029

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran serta analisis pencapaian kinerja secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk mengevaluasi dan mendorong perkembangan literasi di tingkat daerah. IPLM dirancang untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah membangun dan mengelola ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Alat ukur ini berperan penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan literasi, sekaligus memberikan panduan strategis untuk perbaikan di masa depan.

Pada tahun 2025, Perpustakaan Nasional RI memperbarui instrumen IPLM agar lebih selaras dengan prinsip efisiensi dan fokus pada hasil Pembangunan

(outcome-based measurement). Struktur pengukuran IPLM kini terdiri atas dua dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Kepatuhan (30%)

Menilai sejauh mana penyelenggaraan perpustakaan telah memenuhi standar minimum layanan, yang diukur melalui dua subkomponen:

- a. Koleksi Perpustakaan, yaitu ketersediaan, keragaman, dan relevansi bahan bacaan dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Tenaga Perpustakaan, mencakup jumlah, kualifikasi, dan kompetensi pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan.

2. Dimensi Kinerja (70%)

Menilai efektivitas perpustakaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui dua subkomponen:

- a. Pelayanan Perpustakaan, meliputi jumlah pemustaka, frekuensi kunjungan, kegiatan literasi, dan tingkat pemanfaatan layanan;
- b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, mencakup tata kelola, inovasi layanan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Formula perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks} = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$$

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan instrumen baru yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Instrumen ini berbeda dari tahun sebelumnya dan berfokus pada dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja, sehingga hasil 2025 tidak dapat dibandingkan langsung dengan pengukuran IPLM Tahun 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya Pembangunan literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59,46	9.41	15,82	

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Target IPLM yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 59,46, sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 9.41, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini berada pada angka 15,82%. Rendahnya capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pembangunan literasi masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan formula perhitungan dalam pengukuran IPLM yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Perubahan formula tersebut berdampak pada penyesuaian komponen dan bobot penilaian, sehingga nilai yang dihasilkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan sebelumnya. Dengan demikian, ketidak tercapaian target IPLM Tahun 2025 lebih disebabkan oleh faktor metodologis dalam pengukuran, bukan semata-mata akibat rendahnya pelaksanaan program dan kegiatan literasi di daerah.

b. Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan target tahun 2025 dengan realisasi capaian indikator di tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13

Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Ket
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59,46	51,79	59,36	4.88	

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025 dengan capaian beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perbedaan yang tidak dapat disandingkan secara langsung. Target IPLM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 59,46, sedangkan realisasi IPLM Tahun 2023 tercatat sebesar 51,79. Adapun realisasi IPLM Tahun 2025 sebesar 4,88 menunjukkan penurunan nilai secara nominal apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian IPLM Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi Tahun 2023 maupun 2024 karena terdapat perubahan formula perhitungan IPLM yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Perubahan formula tersebut menyebabkan perbedaan komponen, bobot, serta mekanisme penilaian, sehingga nilai IPLM yang dihasilkan tidak lagi berada pada skala yang sama dengan perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan nilai IPLM Tahun 2025 lebih mencerminkan adanya perubahan metodologi pengukuran, bukan penurunan kinerja pembangunan literasi masyarakat secara substantif.

Selain itu, perubahan formula penghitungan IPLM pada Tahun 2025 menuntut adanya penyesuaian dalam penetapan target kinerja dan interpretasi capaian indikator. Target IPLM Tahun 2025 sebesar 59,46 masih mengacu pada kerangka perhitungan sebelumnya, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan metodologi baru yang digunakan dalam pengukuran realisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya persentase capaian secara administratif, meskipun secara substantif program dan kegiatan pembangunan literasi masyarakat tetap dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyesuaian target dan baseline kinerja IPLM agar sejalan dengan formula perhitungan terbaru, sehingga capaian kinerja dapat menggambarkan kondisi riil pembangunan literasi masyarakat secara lebih akurat dan proporsional.

c. Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025-2029					Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59.46	59.56	59.66	59.76	59.86	4.88	8.21%

Sumber: Bidang PKM Disarpusda, Tahun 2024 dan 2025

Rendahnya capaian IPLM Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pembangunan literasi masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh perubahan formula perhitungan IPLM yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Perubahan metodologi pengukuran ini menyebabkan nilai realisasi IPLM tidak berada pada skala yang sama dengan target yang masih mengacu pada kerangka perhitungan sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan antara realisasi IPLM Tahun 2025 dan target Renstra 2025–2029 belum dapat menggambarkan kondisi kinerja secara proporsional, sehingga ke depan diperlukan penyesuaian target dan baseline IPLM agar selaras dengan formula perhitungan terbaru dan mampu merefleksikan capaian pembangunan literasi masyarakat secara lebih akurat.

Implikasi dari adanya kesenjangan antara realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sampai dengan Tahun 2025 dan target jangka menengah dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029 adalah perlunya penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja. Perubahan formula perhitungan IPLM menyebabkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra belum sepenuhnya relevan untuk digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi penilaian kinerja apabila tidak disertai dengan penjelasan metodologis yang memadai.

Selain itu, rendahnya persentase capaian secara administratif dapat berdampak pada hasil evaluasi kinerja perangkat daerah, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan literasi masyarakat tetap berjalan. Oleh karena itu, Disarpusda perlu melakukan review dan penyesuaian baseline serta target IPLM pada periode perencanaan berikutnya agar selaras dengan metodologi pengukuran terbaru. Di sisi lain, diperlukan penguatan koordinasi

dengan Perpustakaan Nasional RI terkait pemahaman indikator dan mekanisme penilaian, serta penajaman program literasi yang secara langsung berkontribusi terhadap komponen penilaian IPLM. Dengan langkah tersebut, capaian kinerja ke depan diharapkan dapat lebih akurat, terukur, dan mencerminkan hasil pembangunan literasi masyarakat yang sesungguhnya.

d. Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2025 terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Capaian Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi Tahun 2025 terhadap capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten/Kota lainnya menunjukkan potret transisi yang sedang berlangsung di tingkat daerah. Analisis ini diperlukan untuk memetakan posisi strategis Kota Bekasi dalam upaya pembangunan literasi di wilayah Jawa Barat.

1. Posisi Komparatif terhadap Rata-Rata Provinsi Jawa Barat

Realisasi IPLM Kota Bekasi sebesar 9,41 menempatkan posisi kinerja daerah dalam tantangan adaptasi terhadap instrumen baru Perpustakaan Nasional RI. Secara agregat, capaian Provinsi Jawa Barat berada di atas angka tersebut karena mencakup akumulasi data dari 27 Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik dan kecepatan adaptasi instrumen yang bervariasi. Penting untuk dicatat bahwa angka Provinsi merupakan nilai komposit yang juga mencakup kinerja perpustakaan tingkat provinsi dan lembaga vertikal lainnya, sehingga secara struktur kewenangan memiliki basis data yang lebih luas dibandingkan lingkup mandiri Kota Bekasi.

2. Perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat

Berdasarkan hasil pemetaan kinerja di Jawa Barat, terdapat disparitas angka yang cukup signifikan antar-wilayah. Beberapa poin utama dalam perbandingan ini adalah:

- Faktor Kewenangan Lokal: Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat melakukan pengukuran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kota Bekasi menitikberatkan pada optimalisasi Dimensi Kinerja (kunjungan masyarakat dan keterlibatan komunitas) di wilayah urban yang padat, sementara beberapa daerah lain mungkin memiliki keunggulan pada Dimensi Kepatuhan (legalitas organisasi perpustakaan).
- Kesenjangan Metodologis: Perbedaan capaian antara Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat lebih banyak dipengaruhi oleh kelengkapan data administratif yang diunggah ke dalam sistem instrumen baru. Daerah yang memiliki banyak perpustakaan sekolah berakreditasi SNP (Standar Nasional Perpustakaan) cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi secara instan dalam formulasi terbaru ini.

3. Analisis Kritis atas Ketidaktercapaian Target

Meskipun realisasi Kota Bekasi (9,41) terlihat jauh dari target Renstra (59,46) maupun rata-rata beberapa daerah lain di Jawa Barat, hal ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya budaya literasi masyarakat Bekasi. Analisis data internal menunjukkan bahwa:

- Validasi Data: Terdapat kendala dalam proses sinkronisasi data dari tingkat satuan pendidikan (SD/SMP) ke dalam portal nasional yang mempengaruhi skor Dimensi Kepatuhan.

- Transisi Instrumen: Kota Bekasi sedang dalam tahap penyesuaian dari 7 unsur pembentuk lama menuju 2 dimensi baru (Kepatuhan & Kinerja), di mana bobot penilaian kini lebih ketat pada aspek formalitas organisasi.

NO.	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
378	KOTA BATAM	0.114	0.189	0.142	0.192	0.151	0.167	12.36
379	KOTA BATU	0.417	0.429	0.429	0.647	0.423	0.538	36.57
380	KOTA BEKASI	0.092	0.208	0.087	0.175	0.15	0.131	9.41
381	KOTA BENGKULU	0.242	0.262	0.211	0.373	0.252	0.292	4
382	KOTA BIMA	0.127	0.206	0.157	0.266	0.167	0.212	19.83
383	KOTA BINJAI	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
384	KOTA BITUNG	0.168	0.197	0.146	0.285	0.183	0.215	6.08
385	KOTA BLITAR	0.144	0.155	0.129	0.206	0.15	0.167	15.54
386	KOTA BOGOR	0.208	0.333	0.214	0.274	0.271	0.244	10.02
387	KOTA BONTANG	0.542	0.39	0.466	0.576	0.466	0.521	42.85
388	KOTA BUKITTINGGI	0.414	0.471	0.405	0.469	0.442	0.437	20.06
389	KOTA CILEGON	0.328	0.114	0.364	0.268	0.221	0.316	28.75
390	KOTA CIREBON	0.191	0.274	0.208	0.331	0.233	0.269	9.93

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan bahwa belum tercapainya target kinerja sampai dengan Tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh perubahan formula perhitungan IPLM yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian indikator, komponen penilaian, serta bobot pengukuran, sehingga nilai IPLM yang dihasilkan berada pada skala yang berbeda

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai secara nominal yang tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan literasi masyarakat di daerah. Dengan demikian, faktor kegagalan pencapaian target lebih bersifat metodologis dan administratif, bukan disebabkan oleh menurunnya komitmen atau kinerja penyelenggaraan program literasi.

Di sisi lain, capaian IPLM pada periode sebelumnya menunjukkan adanya upaya keberhasilan melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan literasi, seperti penguatan layanan perpustakaan, peningkatan akses bahan bacaan, pelaksanaan kegiatan literasi berbasis komunitas, serta pembinaan terhadap perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Namun, dampak dari program-program tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pengukuran IPLM yang baru, sehingga kontribusinya terhadap nilai indeks menjadi terbatas.

Sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan, Disarpusda telah melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan program literasi agar lebih selaras dengan komponen penilaian IPLM terbaru, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI, peningkatan kualitas data dukung dan pelaporan kegiatan literasi, serta penajaman sasaran program yang berorientasi pada peningkatan budaya baca dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Disarpusda juga melakukan evaluasi internal terhadap indikator kinerja dan mempersiapkan penyesuaian target dan baseline IPLM pada periode perencanaan berikutnya, sehingga capaian kinerja di masa mendatang dapat lebih realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi pembangunan literasi masyarakat secara akurat.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa perkembangan layanan literasi di Kota Bekasi telah berjalan, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada pemerataan kuantitas koleksi dan kualitas layanan perpustakaan antar sekolah. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara perpustakaan yang sudah berfungsi optimal dan perpustakaan yang belum berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Hasil pengukuran IPLM 2025 juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan literasi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus Utama pengukuran masih pada pemenuhan standar dasar, seperti jumlah koleksi, keberadaan pustakawan, dan ketersediaan fasilitas, maka pada tahun 2025 terjadi pergeseran menuju peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan perubahan struktur instrumen IPLM 2025 yang menempatkan dimensi kinerja sebagai indikator utama dengan bobot 70 persen, sedangkan dimensi kepatuhan memiliki bobot 30 persen.

Penekanan pada dimensi kinerja menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak hanya diukur dari seberapa lengkap fasilitas yang dimiliki perpustakaan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat layanan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan literasi kini diukur melalui outcome dan dampak sosial yang dihasilkan, bukan semata-mata dari input dan kepatuhan administratif.

Perubahan pendekatan ini mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi actor aktif dalam kegiatan literasi. Peningkatan partisipasi masyarakat terlihat dari

bertambahnya jumlah pemustaka aktif, meningkatnya frekuensi kegiatan literasi berbasis komunitas, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam memperluas jangkauan literasi. Dengan demikian, hasil IPLM Tahun 2025 tetapi juga menandai transformasi paradigma pembangunan literasi di Kota Bekasi. Dari yang semula berorientasi pada pemenuhan infrastruktur dan kepatuhan terhadap standar nasional, kini bergeser ke arah pembangunan literasi yang menekankan pada kualitas, dampak, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlu adanya kematangan system literasi daerah serta kesiapan Kota Bekasi untuk menjadi salah satu kota dengan tata kelola literasi masyarakat yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat.



Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi yaitu dengan menciptakan ekosistem literasi yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan melalui upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bekasi memperluas dan meningkatkan layanan perpustakaan, terutama di daerah yang masih memiliki akses terbatas terhadap layanan literasi melalui pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan kegiatan layanan perpustakaan keliling;
2. Mengembangkan koleksi bahan bacaan yang beragam dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat melalui pelaksanaan sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
4. Mengadakan program literasi yang inovatif, menarik dan relevan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi melalui pelaksanaan sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat.

f. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran urusan perpustakaan, Disarpusda melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan Membaca dengan indikator Persentase penambahan Perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP).

Program : Pembinaan Perpustakaan

Indikator Program : Persentase penambahan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)

Persentase penambahan Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP) dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 10% dari tahun sebelumnya, Dimana tahun 2024 jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan sebanyak 100 perpustakaan. Persentase penambahan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) karena perpustakaan yang memenuhi standar menjamin tersedianya koleksi yang relevan, layanan profesional, serta sarana prasarana yang layak bagi masyarakat. Semakin banyak perpustakaan yang memenuhi SNP, semakin merata akses masyarakat terhadap sumber informasi, ruang belajar, dan layanan literasi yang berkualitas. Kondisi ini mendorong peningkatan frekuensi kunjungan, pemanfaatan koleksi, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi yang diselenggarakan perpustakaan. Pada akhirnya, peningkatan aktivitas dan kualitas interaksi masyarakat dengan perpustakaan tersebut akan tercermin dalam naiknya komponen-komponen penilaian IPLM. Dengan demikian, kebijakan dan program yang mendorong penambahan perpustakaan sesuai SNP secara langsung berkontribusi terhadap penguatan budaya baca dan peningkatan skor IPLM Kota Bekasi.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Indikator Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	Persentase penambahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Belum menjadi target kinerja	100 perpustakaan	10% Atau bertambah 10 perpustakaan	10% 110 perpustakaan	100%

Sumber : Bidang PKM, 2025

Dari tabel tersebut dapat terlihat realisasi persentase penambahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Tahun 2025 sebesar **10%**. Berdasarkan hasil laporan pendataan yang dilakukan Bidang PKM Tahun 2025 diperoleh hasilnya terdapat penambahan perpustakaan sebanyak 10 perpustakaan yaitu: TBM Margajaya, TBM Cerdas Ceria Jatibening, TBM Bantargebang, SDIT Titian Ilmu, SD Marsudirini II, SD Kristen Penabur Harapan Indah, SDN Padurenan VI, SDN Jakasetia III, Perpustakaan Kelurahan Durenjaya, dan Perpustakaan Kelurahan Arenjaya. Capaian persentase penambahan Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP) Tahun 2025 sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan persentase perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan sarana, kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan layanan. Peningkatan sarana dan prasarana di Perpustakaan Daerah Kota Bekasi memperkuat perannya sebagai perpustakaan rujukan yang memenuhi standar ruang, koleksi, dan layanan, sehingga menjadi model penerapan SNP bagi perpustakaan lainnya. Pembinaan kepada perpustakaan sekolah melalui kegiatan bimbingan teknis

juga mendorong peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan koleksi, layanan, dan administrasi perpustakaan sesuai dengan ketentuan SNP.

Sosialisasi budaya baca melalui kegiatan bedah buku sejarah Kota Bekasi berfungsi memperkuat aspek layanan dan program literasi dalam SNP sekaligus meningkatkan tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Penambahan koleksi digital memperluas akses terhadap sumber informasi yang relevan dan mutakhir, sehingga mendukung pemenuhan standar koleksi dan layanan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pengadaan perpustakaan mini memperluas jangkauan layanan ke lingkungan masyarakat yang belum terlayani secara optimal, yang pada gilirannya menambah jumlah unit perpustakaan yang dapat dibina dan ditingkatkan menuju pemenuhan SNP.

Pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional RI turut memperkuat upaya Disarpusda dalam mendorong perpustakaan agar berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Melalui TPBIS, perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan warga, sehingga aspek layanan, pemanfaatan, dan dampak sosial perpustakaan semakin meningkat. Seluruh rangkaian program tersebut secara kumulatif mendorong bertambahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi unsur SNP, yang tercermin dalam meningkatnya persentase perpustakaan sesuai standar dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi. Selain itu Disarpusda juga menjalin sinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat Kota Bekasi, Perpustakaan RI dan Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

Capaian indikator program ini didukung 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan dengan pagu sebesar Rp.39.512.000,-
2. Sub kegiatan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.96.496.000,-
3. Sub kegiatan Penyusunan data dan informasi perpustakaan dengan pagu sebesar Rp.250.000.000,-
4. Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka dengan pagu sebesar Rp.35.250.000,-
5. Sub kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp.59.500.000,-
6. Sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dengan pagu anggaran Rp.106.724.000,-
7. Sub kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.188.026.160,-
8. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat dengan pagu sebesar Rp.276.608.000,-

Tahun 2025 untuk mencapai program ini mendapatkan pagu sebesar Rp.1.052.116.160,- dengan realisasi sebesar Rp.974.805.702,- dengan capaian anggaran sebesar 92.65%.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator Kinerja Utama : Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip

Pencapaian Sasaran Strategis II diukur melalui Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, yaitu indikator yang menggambarkan tingkat penerapan pengelolaan arsip

berbasis elektronik pada perangkat daerah. Nilai indikator ini diperoleh melalui proses penilaian yang dilaksanakan berdasarkan Instrumen Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui keputusan Kepala ANRI. Penilaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip elektronik dilaksanakan secara tertib, terstandar, dan berkelanjutan.

Melalui instrumen APAE, pengukuran tingkat digitalisasi arsip mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) digitalisasi arsip, yang menilai pelaksanaan kegiatan alih media arsip ke dalam format digital sesuai ketentuan, termasuk evaluasi bukti alih media elektronik serta keutuhan dan kelengkapan metadata arsip; (2) implementasi aplikasi pengelolaan arsip dinamis, yang dilihat dari pemanfaatan aplikasi kearsipan elektronik seperti SRIKANDI, serta keterhubungannya dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (3) partisipasi dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), yang mengukur keterlibatan dalam jaringan nasional guna mendukung interoperabilitas dan integrasi data arsip; serta (4) ketersediaan sumber daya pendukung, yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan manajemen dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan arsip elektronik.

Dengan demikian, Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip tidak hanya mencerminkan sejauh mana arsip telah dialihkan ke bentuk digital, tetapi juga menunjukkan tingkat kematangan sistem, tata kelola, dan dukungan organisasi dalam penyelenggaraan kearsipan elektronik secara menyeluruh.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025

Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.16
Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2025 (%)	Ket
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	93.1	92	98.81	

Perbandingan antara target dan realisasi Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 93,1 belum sepenuhnya tercapai. Realisasi nilai yang diperoleh pada tahun pelaporan adalah sebesar 92, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 98,81 persen. Meskipun secara persentase capaian menunjukkan hasil yang tinggi dan mendekati target, indikator ini secara administratif masih dikategorikan belum tercapai.

Ketidaktercapaian target Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh terjadinya penurunan nilai pada aspek kebijakan dan implementasi Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), khususnya dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI serta keterlibatan perangkat daerah dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Walaupun kebijakan umum terkait pengelolaan arsip elektronik telah tersedia, implementasinya di tingkat perangkat daerah belum berjalan secara konsisten, merata, dan terstandar. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya integrasi sistem, pemanfaatan aplikasi kearsipan elektronik, serta kualitas pengelolaan arsip digital secara menyeluruh, sehingga mempengaruhi capaian akhir nilai tingkat digitalisasi arsip.



b. Perbandingan antara target dengan realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan target tahun 2025 dengan realisasi capaian indicator di tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

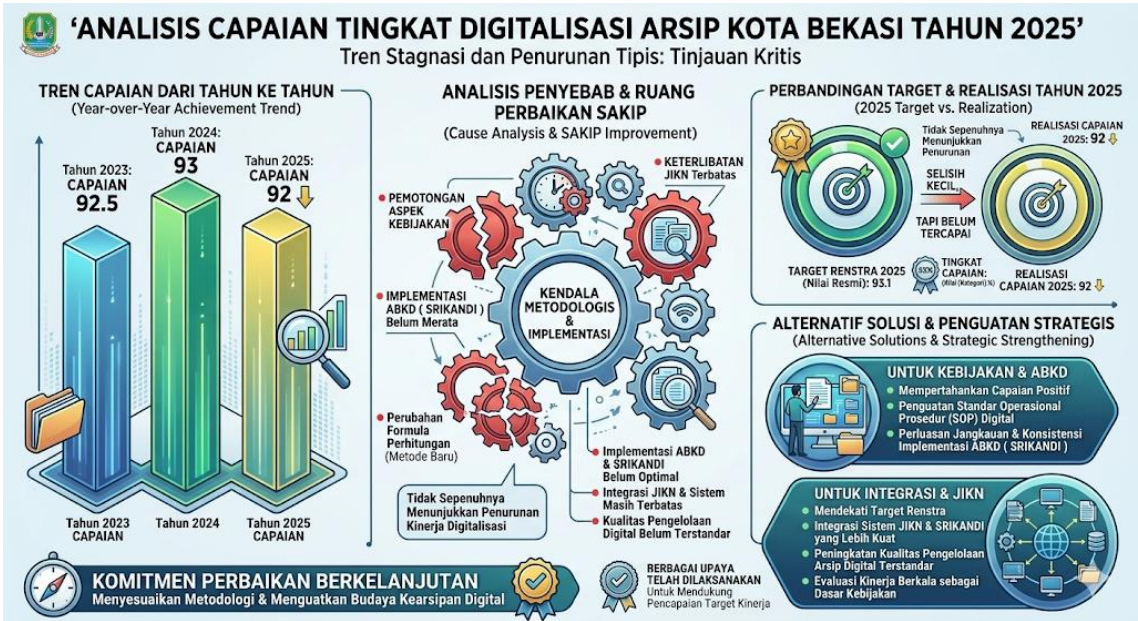
Tabel 3.17

Perbandingan antara target dengan realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Ket
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	93.1	N/A	93	92	

Perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 dengan capaian beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi dan penurunan tipis. Target Tingkat Digitalisasi Arsip yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 93,1, sedangkan realisasi pada Tahun 2024 tercatat sebesar 93. Pada Tahun 2025, realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip mengalami penurunan menjadi 92, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun selisih capaian relatif kecil, penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan digitalisasi

arsip belum berjalan secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan dan pemanfaatan Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis, khususnya penggunaan aplikasi SRIKANDI dan keterlibatan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), yang berdampak pada kualitas pengelolaan arsip digital secara menyeluruh.



c. **Perbandingan Realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029**

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025-2029					Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025
1	Tingkat Digitalisasi Arsip	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	92	98.81

Sumber: Bidang PIK Disarpusda, 2025

Perbandingan antara realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Dalam Renstra Disarpusda, target Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan meningkat secara bertahap, yaitu sebesar 93,1 pada Tahun 2025, 93,2 pada Tahun 2026, 93,3 pada Tahun 2027, 93,4 pada Tahun 2028, dan 93,5 pada Tahun 2029. Sementara itu, realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 92, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target Tahun 2025 mencapai 98,81 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan digitalisasi arsip telah berjalan dengan baik dan mendekati target jangka menengah Renstra. Namun demikian, selisih antara realisasi dan target awal Renstra mengindikasikan perlunya penguatan dan konsistensi implementasi pengelolaan arsip elektronik di seluruh perangkat daerah. Apabila tidak dilakukan langkah perbaikan yang terarah, kondisi ini berpotensi mempengaruhi pencapaian target Tingkat Digitalisasi Arsip pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan kebijakan, optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis, serta peningkatan pembinaan dan monitoring evaluasi agar capaian Tingkat Digitalisasi Arsip dapat terus meningkat dan selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Tingkat Digitalisasi Arsip serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Ketidaktercapaian target nilai tingkat digitalisasi arsip pada tahun pelaporan dipengaruhi oleh terjadinya penurunan nilai pada aspek kebijakan dan implementasi Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), khususnya pada pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dan keterlibatan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Meskipun kebijakan umum telah tersedia, implementasinya di tingkat perangkat daerah belum berjalan secara konsisten dan terstandar, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip digital secara menyeluruh.

Selain itu, belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan pemberkasan arsip secara optimal melalui aplikasi SRIKANDI, baik dalam hal kelengkapan dokumen, ketertiban klasifikasi, maupun konsistensi pencatatan arsip aktif dan inaktif. Di sisi lain, aktivitas

unggahan dan input data arsip ke dalam aplikasi JIKN masih relatif rendah, sehingga keterwakilan khazanah arsip daerah dalam sistem kearsipan nasional belum optimal. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya skor penilaian pada komponen sumber daya dan implementasi ABKD, yang pada akhirnya menurunkan capaian nilai tingkat digitalisasi arsip secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kearsipan Kota Bekasi memperoleh Nilai Hasil Pengawasan (NHP) dengan kategori penilaian A (memuaskan). Untuk Kategori Kabupaten Kota se Indonesia Kota Bekasi berada pada peringkat 56 turun dari peringkat 29 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain maka nilai indeks pengawasan kearsipan Kota Bekasi yang dapat dilihat dalam Surat Pengumuman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.00/2/2025 tentang hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 pengelolaan kearsipan Kota Bekasi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purwakarta.

Implikasi dari perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 dengan capaian beberapa tahun terakhir adalah perlunya penguatan konsistensi kebijakan dan implementasi pengelolaan arsip digital di seluruh perangkat daerah. Penurunan nilai realisasi dari 93 pada Tahun 2024 menjadi 92 pada Tahun 2025, serta belum tercapainya target 93,1, menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi arsip belum berlangsung secara berkelanjutan dan merata. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya

pencapaian target jangka menengah apabila tidak segera dilakukan langkah perbaikan yang sistematis.

Selain itu, stagnasi dan penurunan capaian tersebut dapat berdampak pada penilaian kinerja penyelenggaraan kearsipan daerah, khususnya dalam aspek pemanfaatan Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis dan keterlibatan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Oleh karena itu, Disarpusda perlu mendorong penguatan implementasi aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh, meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip elektronik, serta memperkuat pembinaan dan monitoring evaluasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian Tingkat Digitalisasi Arsip pada tahun-tahun berikutnya dapat kembali meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2025

49	Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	A (MEMUASKAN)
50	Jawa Tengah	Kabupaten Batang	A (MEMUASKAN)
51	Jawa Tengah	Kota Surakarta	A (MEMUASKAN)
52	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	A (MEMUASKAN)
53	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	A (MEMUASKAN)
54	Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	A (MEMUASKAN)
55	Banten	Kabupaten Tangerang	A (MEMUASKAN)
56	Jawa Barat	Kota Bekasi	A (MEMUASKAN)
57	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	A (MEMUASKAN)
58	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	A (MEMUASKAN)
59	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	A (MEMUASKAN)

Sumber : ANRI, 2025

e. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan, urusan kearsipan dilaksanakan melalui dua program, yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Kedua program tersebut dirancang untuk saling melengkapi dalam memastikan tersedianya arsip yang autentik, utuh, dan dapat diakses sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintah dan memori kolektif daerah.

Melalui analisis program ini, diuraikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari masing-masing program terhadap pencapaian

indikator kinerja urusan kearsipan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan, sekaligus mengungkap faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja, sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan penguatan program pada periode berikutnya.

Program : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Indikator Program : Persentase Penambahan Khazanah Arsip Statis pada Depo Arsip
--

Penambahan khazanah arsip statis pada depo arsip memiliki keterkaitan langsung terhadap capaian tingkat digitalisasi arsip, karena setiap proses akuisisi, pengolahan, dan penyimpanan arsip statis mensyaratkan ketersediaan arsip dalam bentuk digital yang autentik, utuh, dan terstandar. Semakin banyak arsip statis yang diserahkan oleh OPD ke lembaga kearsipan daerah, semakin besar pula kebutuhan untuk melakukan alih media, pemberian metadata, dan pengelolaan arsip dalam sistem elektronik. Proses ini secara otomatis meningkatkan volume dan kualitas arsip digital yang tercatat dalam sistem kearsipan dinamis dan statis.

Selain itu, peningkatan khazanah arsip statis mendorong OPD untuk lebih tertib dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI dan mendukung pengisian JIKN, karena arsip yang akan diserahkan harus dapat ditelusuri asal-usulnya sejak fase arsip dinamis. Dengan demikian, semakin tinggi realisasi penambahan khazanah arsip statis di depo arsip, semakin kuat pula ekosistem pengelolaan arsip berbasis digital yang terbentuk, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai tingkat digitalisasi arsip dalam penilaian kearsipan dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan Indikator program persentase penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip dihasilkan dari penambahan hasil akuisisi arsip statis yang ada pada unit kearsipan di perangkat daerah yang ada di Kota Bekasi. Pada tahun 2025, Bidang Kearsipan pada Disarpusda Kota Bekasi berhasil mengakuisisi 27 boks arsip statis, sehingga jumlah keseluruhan arsip statis yang ada di depo arsip sebanyak 430 boks. Target 2025 untuk program ini yaitu 10% atau bertambah 40 boks sedangkan penambahan yang ada sebanyak 27 boks dengan tingkat capaian 6.7%, untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Tahun 2025

URAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
Persentase Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip	322 Boks	403 Boks	10% 443 Boks	6.7% 430 Boks	67%

Sumber : Bidang Arsip, 2025

Ketidaktercapaian indikator persentase penambahan khazanah arsip statis pada depo arsip disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap kriteria dan karakteristik arsip yang memiliki nilai guna sekunder, khususnya nilai guna kesejarahan. Banyak OPD belum mampu mengidentifikasi arsip mana yang telah habis masa retensinya namun memiliki nilai permanen, sehingga arsip tersebut tidak dipersiapkan dan tidak diusulkan untuk diserahkan sebagai arsip statis. Kondisi ini menyebabkan potensi arsip bernilai sejarah yang seharusnya menjadi bagian dari memori kolektif daerah tidak terhimpun secara optimal di depo arsip.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan perangkat daerah

terhadap kewajiban penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah turut memperlambat penambahan khazanah arsip. Penyerahan arsip masih dipandang sebagai beban administratif, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelamatan aset informasi pemerintah daerah. Akibatnya, proses akuisisi arsip statis berjalan tidak optimal, baik dari sisi jumlah maupun kontinuitas, sehingga indikator persentase penambahan khazanah arsip statis tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator program ini didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan pagu anggaran Rp.117.013.750,- serta sub kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,-.

Program	: Pengelolaan Arsip
Indikator Program	: Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip secara Tertib

Capaian persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib merupakan faktor kunci yang sangat menentukan tingkat digitalisasi arsip. Ketertiban arsip mencakup penerapan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, pemberkasan, serta pencatatan arsip secara konsisten di setiap tahapan proses kerja. Ketika perangkat daerah telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, maka seluruh arsip yang diciptakan memiliki struktur, konteks, dan metadata yang jelas, sehingga siap untuk dikelola melalui sistem kearsipan elektronik seperti SRIKANDI dan sistem ABKD lainnya. Dalam kondisi ini, digitalisasi tidak hanya menjadi proses pemindaian atau pengunggahan dokumen, tetapi menjadi bagian integral dari manajemen arsip yang menjamin autentisitas, keutuhan, dan keterlacakan arsip.

Tingginya persentase perangkat daerah yang tertib arsip juga berdampak pada luasnya cakupan arsip yang masuk ke dalam ekosistem digital pemerintah daerah. Setiap OPD yang tertib akan secara rutin melakukan pencatatan naskah dinas, pemberkasan arsip aktif dan inaktif, serta penetapan arsip yang telah habis masa retensinya. Seluruh proses ini, apabila dijalankan melalui aplikasi SRIKANDI, akan menghasilkan basis data arsip elektronik yang lengkap dan mutakhir. Data inilah yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian tingkat digitalisasi arsip oleh ANRI, baik dari sisi volume arsip yang terkelola secara elektronik maupun dari sisi kualitas pengelolaannya.

Sebaliknya, apabila masih banyak perangkat daerah yang belum tertib dalam mengelola arsip, maka tingkat digitalisasi arsip akan terhambat. Arsip yang tidak diklasifikasikan dengan benar, tidak diberi kode, atau tidak dibundel dalam pemberkasan yang rapi akan sulit dimasukkan ke dalam sistem elektronik, sehingga banyak arsip yang tetap berada di luar sistem. Kondisi ini menurunkan akurasi data, melemahkan fungsi temu kembali arsip, dan pada akhirnya menurunkan nilai penilaian digitalisasi. Oleh karena itu, peningkatan persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib merupakan fondasi utama bagi peningkatan tingkat digitalisasi arsip, sekaligus mencerminkan kematangan tata kelola informasi pemerintah daerah dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Program Pengelolaan Arsip dengan Indikator program persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dihasilkan dari membandingkan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dengan jumlah total perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan sumber daya kearsipan, sumber daya manusia, peralatan, pendanaan dan pendekatan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan dilakukan terhadap pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang telah dilakukan oleh perangkat daerah se-Kota Bekasi untuk mewujudkan pengelolaan Arsip secara tertib.

Pada tahun 2025, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara tertib telah mencapai 17 perangkat daerah dari 44 perangkat daerah di seluruh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga realisasi sebesar 38.64% dari target 56.81% dengan tingkat capaian sebesar 68.01%, untuk lebih lengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Arsip Tahun 2025

Sumber : Bidang PIK

INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara tertib	36.36 % (16 OPD)	54.54% (24 OPD)	56.81% (25 OPD)	38.64% (17 OPD)	68.01%

Perangkat Daerah yang Menerapkan pengelolaan Arsip Secara Tertib adalah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal lebih dari 70 kategori Sangat Baik (BB), Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA).

Untuk memperoleh gambaran dari pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah yang memenuhi prosedur pengelolaan arsip secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan, maka Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bekasi melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi dan melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pengelolaan arsip tersebut. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah meliputi :

- a. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, mulai dari : 1) Registrasi atau pencatatan arsip; 2) Pemberkasan arsip; 3) Penyimpanan dan pemeliharaan arsip; 4) Penyusutan arsip; dan Akses/pemanfaatan arsip dinamis dan arsip statis;
- b. Pendukung penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, meliputi: 1) Sumber Daya Manusia kearsipan; dan 2) Sarana dan Prasarana Penunjang.

Target Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib Tahun 2025 sebesar 56.81 %. Untuk Tahun 2025 Prosentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara tertib menggunakan indikator dan nilai hasil Monitoring dan Evaluasi Kearsipan dimana terdapat 17 perangkat daerah yang mendapatkan nilai 70 sehingga realisasi sebesar 38,64%.

Ketidaktercapaian persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib pada tahun pelaporan tidak terlepas dari masih adanya 17 perangkat daerah yang belum patuh dalam mengimplementasikan penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem resmi penciptaan dan pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah. Ketidakpatuhan tersebut tercermin dari masih digunakannya mekanisme penciptaan dan pengelolaan dokumen secara konvensional di luar sistem elektronik, baik dalam bentuk surat menyurat manual, penyimpanan berkas fisik tanpa pemberkasan terstandar, maupun penggunaan aplikasi non-kearsipan yang tidak terintegrasi dengan ABKD. Kondisi ini menyebabkan arsip yang diciptakan tidak tercatat secara utuh dalam SRIKANDI,

sehingga tidak dapat diverifikasi dan dinilai sebagai bagian dari sistem pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai standar nasional.

Di sisi lain, perubahan kebijakan dan standar eviden dari penciptaan arsip secara konvensional menuju penciptaan arsip secara digital melalui SRIKANDI juga memberikan dampak signifikan terhadap penilaian ketertiban arsip. Dalam sistem penilaian kearsipan, arsip yang dianggap sah dan memenuhi prinsip autentisitas, keutuhan, dan keterandalan adalah arsip yang dihasilkan, diregistrasi, dan diberkaskan melalui aplikasi resmi. Perangkat daerah yang belum sepenuhnya beralih ke mekanisme digital tersebut mengalami penurunan nilai pada aspek penciptaan arsip, karena banyak aktivitas administrasi yang tidak tercermin dalam data sistem. Penurunan nilai pada aspek penciptaan ini kemudian berdampak secara berantai terhadap aspek-aspek lain, seperti pemberkasan, penyimpanan, dan temu kembali arsip.

Akibatnya, meskipun sebagian perangkat daerah secara faktual masih menghasilkan dan menyimpan dokumen, namun secara sistemik mereka tidak memenuhi kriteria pengelolaan arsip yang tertib berbasis digital. Hal ini menurunkan nilai tertib arsip secara keseluruhan pada tingkat perangkat daerah, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya persentase OPD yang dapat dikategorikan telah menerapkan pengelolaan arsip secara tertib sesuai standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan indikator tertib arsip tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen, tetapi sangat bergantung pada kepatuhan perangkat daerah dalam menggunakan SRIKANDI sebagai instrumen utama penciptaan dan pengelolaan arsip elektronik pemerintah daerah.

Pada Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.5.15.1/Kep.513-Disarpusda/X/2025 tentang Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun

2025 terdapat 17 Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sekurang-kurangnya 70 kategori Sangat Baik (BB), Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA).

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Melakukan Pembinaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah terhadap Perangkat Daerah yang Nilai Pengawasan Kearsipannya dibawah 60 yang terdiri 24 Perangkat Daerah yang dititikberatkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Perangkat Daerah yang terdiri dari Aspek Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan Aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana;
2. Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah untuk mengelola Arsip Sesuai dengan NSPK;
3. Perhatian Pimpinan dalam bentuk penghargaan terhadap Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan Internal sekurang-kurangnya 80 kategori Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA);
4. Pemenuhan terhadap kebutuhan SDM dan Sarana dan Prasarana Kearsipan pada Perangkat daerah yang sesuai standar.

Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan dalam mendukung capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan, sehingga subkegiatan ini sangat mendukung dan memastikan pengelolaan arsip dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan;

2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, mendukung terhadap aspek penggunaan dalam tertib arsip, karena JIKN dan SIKN memudahkan tersedianya informasi akses dan layanan kearsipan;
3. Sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis, memberikan dukungan dalam pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah mulai dari aspek penciptaan, pemeliharaan, penggunaan dan penyusutan dalam bentuk pembinaan;

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp.15.657.536.820,-. Berikut realisasi anggaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya:

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanjanya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

URAIAN	APBD	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	Rp.15.657.536.820,-	Rp.13.830.963.746,-	88.33%
a. Belanja Operasi	Rp15.252.791.820,-	Rp.13.435.307.246,-	88.05%
• Belanja Pegawai	Rp.11.160.930.000,-	Rp.9.709.597.758,-	85.95%
• Belanja Barang dan Jasa	Rp.3.816.913.820,-	Rp.3.458.069.758-	92.49%
• Belanja Hibah	Rp.274.984.000,-	Rp.267.639.730,-	98.90%
b. Belanja Modal	Rp404.745.000,-	Rp395.656.500,-	97.75%
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.353.245.000,-	Rp.347.493.900,-	98.37%

URAIAN	APBD	REALISASI	(%)
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.51.500.000,-	Rp.48.162.600,-	93.52%
• Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.0,-	Rp.0,-	0%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disarpusda Tahun 2025

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	15.657.536.820	15.657.536.820	100	13.830.963.746	88,33	100	99,72
2.18.02.01	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	15.657.536.820	15.657.536.820	100	13.830.963.746	88,33	100	99,72
2.18.02.01 - 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.052.116.160	1.052.116.160	100	974.805.702	92,65	100	96,61
2.18.02.01 - 02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	480.758.000	480.758.000	100	416.688.272	86,67	100	92,57
2.18.02.01 - 02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	39.512.000	39.512.000	100	32.608.200	82,53	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.496.000	96.496.000	100	93.337.022	96,73	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	250.000.000	250.000.000	100	234.231.450	93,69	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	35.250.000	35.250.000	100	33.423.600	94,82	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	59.500.000	59.500.000	100	23.088.000	38,8	100	40
2.18.02.01 - 02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	571.358.160	571.358.160	100	558.117.430	97,68	100	100
2.18.02.01 - 02.2.02.07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	106.724.000	106.724.000	100	105.697.792	99,04	100	100

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02.01 - 02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.026.160	188.026.160	100	182.652.500	97,14	100	100
2.18.02.01 - 02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	276.608.000	276.608.000	100	269.767.138	97,53	100	100
2.18.02.01 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.812.580.910	13.812.580.910	100	12.086.084.587	87,5	100	99,95
2.18.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.745.000	69.745.000	100	69.058.420	99,02	100	90
2.18.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.745.000	69.745.000	100	69.058.420	99,02	100	90
2.18.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.210.930.000	11.210.930.000	100	9.758.604.883	87,05	100	100
2.18.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.195.930.000	11.195.930.000	100	9.744.134.783	87,03	100	100
2.18.02.01 - 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100	4.855.000	97,1	100	100
2.18.02.01 - 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100	9.615.100	96,15	100	100

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.500.000	62.500.000	100	52.000.000	83,2	100	100
2.18.02.01 - 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.500.000	62.500.000	100	52.000.000	83,2	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.377.000	521.377.000	100	503.013.756	96,48	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	100	39.618.296	99,05	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	100	28.559.500	95,2	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.837.000	247.837.000	100	234.969.540	94,81	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.560.000	42.560.000	100	41.073.500	96,51	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100	29.420.000	98,07	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	7.000.000	100	6.900.000	98,57	100	100
2.18.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.130.000	98.130.000	100	97.425.920	99,28	99,99	100
2.18.02.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.850.000	25.850.000	100	25.047.000	96,89	100	100
2.18.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.276.000	113.276.000	100	110.556.000	97,6	100	100
2.18.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.276.000	113.276.000	100	110.556.000	97,6	100	100

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.637.910	1.066.637.910	100	881.595.628	82,65	100	100
2.18.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	279.000.000	100	157.475.929	56,44	100	100
2.18.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.637.910	787.637.910	100	724.119.699	91,94	100	100
2.18.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.115.000	768.115.000	100	711.255.900	92,6	100	100
2.18.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000	230.000.000	100	207.843.750	90,37	100	100
2.18.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.140.000	232.140.000	100	207.749.900	89,49	100	100
2.18.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	120.000.000	100	112.250.000	93,54	100	100
2.18.02.01 - 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.975.000	185.975.000	100	183.412.250	98,62	100	100
2.18.02.01 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	645.826.000	645.826.000	100	629.184.901	97,42	100	99,79
2.18.02.01 - 02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	427.779.000	427.779.000	100	413.325.082	96,62	100	99,69

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02.01 - 02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	119.151.000	119.151.000	100	116.711.892	97,95	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.948.000	274.948.000	100	267.639.730	97,34	100	100
2.18.02.01 - 02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	33.680.000	33.680.000	100	28.973.460	86,03	100	96
2.18.02.01 - 02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	197.820.000	197.820.000	100	196.014.936	99,09	100	100
2.18.02.01 - 02.2.02.04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	197.820.000	197.820.000	100	196.014.936	99,09	100	100
2.18.02.01 - 02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20.227.000	20.227.000	100	19.844.883	98,11	100	100
2.18.02.01 - 02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20.227.000	20.227.000	100	19.844.883	98,11	100	100
2.18.02.01 - 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	147.013.750	147.013.750	100	140.888.556	95,83	100	100
2.18.02.01 - 03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	117.013.750	117.013.750	100	112.522.950	96,16	100	100
2.18.02.01 - 03.2.01.04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	117.013.750	117.013.750	100	112.522.950	96,16	100	100

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							
2.18.02.01 - 03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100	28.365.606	94,55	100	100
2.18.02.01 - 03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	30.000.000	30.000.000	100	28.365.606	94,55	100	100
TOTAL		15.657.536.820	15.657.536.820	100	13.830.963.746	88,33	100	99,72

Sumber: Data hasil olahan berdasarkan data dari SIMPELBANG 2025

Berikut ini dapat disampaikan sandingan pagu anggaran, realisasi dan capaian keuangan Disarpusda Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.24 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	URAIAN	2024	2025
1	Pagu anggaran	Rp.17.417.495.480,-	Rp.15.657.536.820,-
2	Realisasi	Rp.15.367.992.890,-	Rp.13.830.963.746,-
3	Capaian	88.23%	88.33%

Sumber : Simpelbang Disarpusda Tahun 2024 dan 2025

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Disarpusda Tahun 2025 sebesar Rp.13.830.963.746,- atau 88.33% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.657.536.820,- Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 lalu, realisasi anggaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.367.992.890,- atau sebesar 88.23% dari pagu Tahun 2024 sebesar Rp.17.417.495.480,-. Hasil sandingan tahun 2025 dengan tahun 2024 menunjukkan realisasi keuangan Disarpusda lebih meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2024. Meskipun realisasi fisik Disarpusda Tahun 2025 telah mencapai 100%, namun anggaran Disarpusda Tahun 2025 terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.826.573.074,- atau sebesar 11.67% dari pagu anggaran, hal ini terjadi karena efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil negosiasi pengadaan barang/jasa.

Efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian indikator sasaran pada Disarpusda dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.25 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran/ Kebutuhan Anggaran/ Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59.46	36.83	61.94
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.1.052.116.160,-	Rp.974.805.702,-	92.65
	Nilai Efisiensi	-30,71		

No	Sasaran/ Kebutuhan Anggaran/ Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian %
2	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	93.1	92	98.81
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.792.839.750,-	Rp.770.073.457,-	97.13
	Nilai Efisiensi	1,68		

Ket :

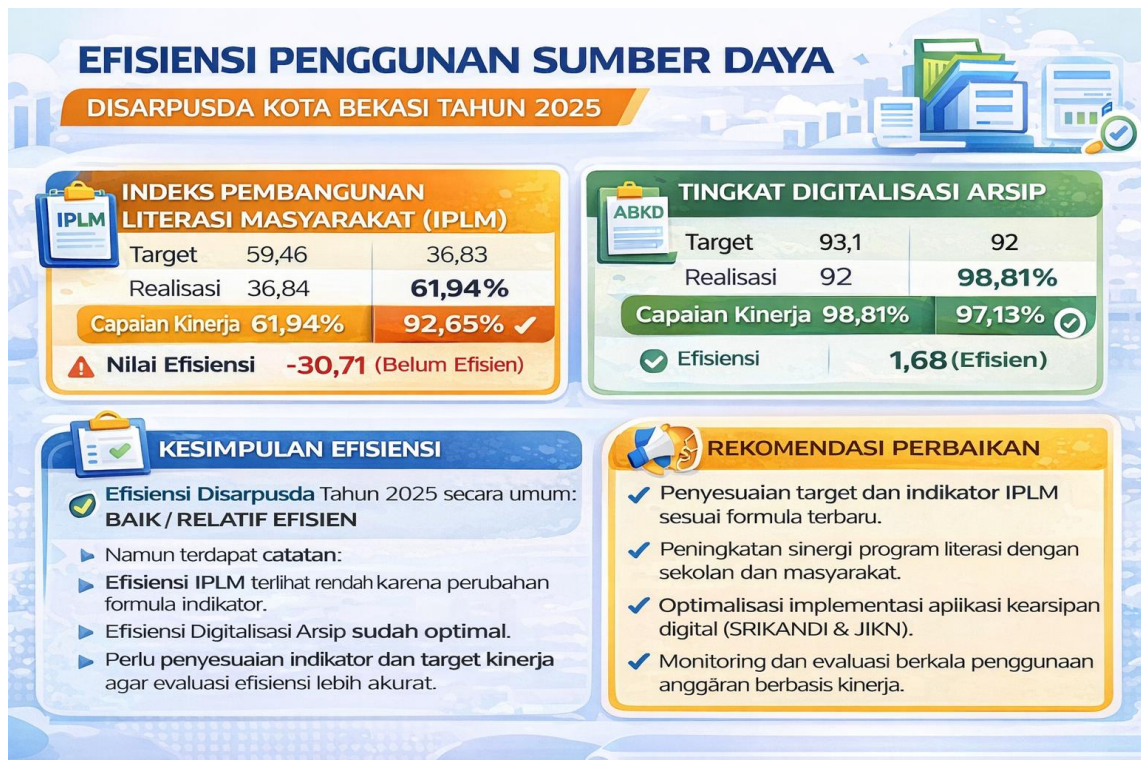
Capaian : Realisasi / Target x 100%

Tingkat efisiensi : capaian kinerja - capaian penyerapan anggaran

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya pada Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan secara relatif efisien. Berdasarkan data pada tabel efisiensi anggaran, capaian kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 61,94 persen, sementara capaian penyerapan anggaran berada pada angka 92,65 persen. Selisih antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar - 30,71, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat pencapaian kinerja indikator. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi nilai indikator akibat perubahan formula perhitungan IPLM, sehingga capaian kinerja secara administratif menjadi rendah meskipun program dan kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran terserap dengan baik.

Sementara itu, pada indikator Tingkat Digitalisasi Arsip, capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih optimal. Realisasi kinerja mencapai 98,81 persen, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,13 persen, sehingga menghasilkan nilai efisiensi positif sebesar 1,68. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran peningkatan digitalisasi arsip telah dilaksanakan secara efisien dan proporsional, di mana tingkat pencapaian kinerja relatif sebanding dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya Disarpusda Tahun 2025

menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal, namun masih diperlukan penyesuaian indikator dan target kinerja—khususnya pada indikator IPLM—agar hubungan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercermin secara lebih akurat dan adil dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.



3.4 PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025 adalah



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025 serta merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang ingin dicapai.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi secara keseluruhan dari Sasaran Strategis sebagai berikut:

Gambar Capaian Kinerja Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Data diolah berdasarkan data dari Renja dan hasil evaluasi

Capaian kinerja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disimpulkan terdapat kedua indikator kinerja utama belum mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah tetap berupaya untuk mencapai tujuan mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam melakukan pembinaan serta sosialisasi kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat ataupun pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan.

Pencapaian target indikator kinerja Disarpusda Kota Bekasi juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota

Bekasi pada tahun 2025 sebesar **Rp.15.657.536.820,-** dengan realisasi anggaran Disarpusda sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar **Rp.13.830.963.746,-** dengan capaian 88.33%. Capaian tersebut dipengaruhi ada sisa hasil negosiasi pengadaan barang dan jasa.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk keberlanjutan program pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi masyarakat, yang diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat dan daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah lainnya, Pelaksana Pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat lebih berkomitmen dalam menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengupayakan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana pembangun literasi masyarakat.

Membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan menjadi gerakan sosial (*social movement*) oleh seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Upaya tersebut dapat terwujud melalui optimalisasi tugas, peran, serta fungsi dan kinerja semua jenis perpustakaan, terutama Perpustakaan Umum Kota Bekasi, dalam menggerakkan masyarakat Kota Bekasi untuk menjadi pemustaka aktual dan terdaftar sebagai anggota perpustakaan, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh para pihak.

Dalam hal tata kelola kearsipan, kedepan diharapkan pengelola kearsipan yang ada di semua perangkat daerah dapat menyimpan arsipnya secara memberkas, dibuat daftar arsip sehingga pada saatnya penyusutan sudah rapi daftar arsipnya. Terkait sarana dan prasarana masing-masing Perangkat Daerah dapat mengusulkan sarana dan prasarana (sarpras) kearsipan di masing-masing

BLPU Perangkat Daerahnya. Serta diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan perangkat daerah tentang pelaksanaan tata kelola kearsipan.

Hal penting untuk perbaikan kedepan diperlukan peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Disarpusda Kota Bekasi. Selain itu dibutuhkan keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk mengevaluasi kinerja sehingga mendukung keakuratan dan absahan data di dalam dokumen LKIP.

LKIP yang telah disusun agar menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Disarpusda Kota Bekasi dan dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi dalam memperbaiki kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan yang lebih baik dan berkualitas di masa-masa mendatang.

Bekasi, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BEKASI



IIS WISYNUWATI, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680731 198803 2 002